

MANUAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020



DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAFTAR ISI

SURAT DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH PERIHAL PENYAMPAIAN MANUAL
TATA CARA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(EKPPD) TAHUN 2020 TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD) TAHUN 2019.....

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Evaluasi	3
III. Maksud Dan Tujuan	3
IV. Ruang Lingkup Evaluasi	4
V. Organisasi Dan Hubungan Kerja dalam Pelaksanaan EKPPD	5
VI. Jadwal Pelaksanaan Evaluasi	7
VII. Pelaksana Evaluasi	9
VIII. Hasil Evaluasi	9
IX. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	9
BAB II PELAKSANAAN EVALUASI	11
A. Tahapan Evaluasi	11
B. Metodologi Evaluasi	12
C. Instrumen Evaluasi	18
D. Prinsip Dasar Evaluasi	26
E. Prosedur Evaluasi	30
F. Dasar Penugasan dan Pemingkatan	33
BAB III PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD)	35
A. Jenis dan Format Laporan Hasil Evaluasi.....	35
B. Pelaporan EKPPD oleh Timda	35
C. Pelaporan EKPPD oleh Tim Teknis EPPD	35
D. Penyampaian Laporan	36
BAB IV PENJELASAN TAMBAHAN	38
I. Penjelasan Tambahan IKK Provinsi	38
II. Penjelasan Tambahan IKK Kabupaten/Kota	40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Dokumen Pendukung Elemen Data IKK Provinsi
- Lampiran 2 : Daftar Dokumen Pendukung Elemen Data IKK Kabupaten/Kota
- Lampiran 3 : Petunjuk Pengisian Capaian Kinerja Pada Template Individu Provinsi
EPPD 2020 Provinsi
- Lampiran 4 : Petunjuk Pengisian Capaian Kinerja Pada Template Individu
Kabupaten/Kota EPPD 2020 Kabupaten/Kota
- Lampiran 5 : Format Laporan Hasil Evaluasi Individu Kabupaten/Kota
- Lampiran 6 : Berita Serah Terima Hasil Evaluasi Timda
- Lampiran 7 : Berita Acara Serah Terima Validasi Tim Teknis
- Lampiran 8 : Berita Acara dan Notisi Hasil Evaluasi Timda
- Lampiran 9 : Berita Acara dan Notisi Hasil Evaluasi Timda

SURAT MENTERI DALAM NEGERI PERIHAL MANUAL EKPPD 2020 TERHADAP LPPD 2019



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juni 2020

Nomor : 120.04/3098/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Manual Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EPPD) Tahun 2020 terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Tahun 2019

Yth. Para Gubernur
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Untuk memastikan penyelenggaraan EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan efektif, maka pelaksanaannya diatur dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. **Konfirmasi, verifikasi dan klarifikasi data kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Daerah EPPD.**

Mekanisme pelaksanaan tahapan ini dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta kondisi dan kebijakan daerah dalam pencegahan pandemi covid-19.
 - b. **Validasi data kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis Nasional EPPD.**

Tahapan ini dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta berfokus kepada capaian kinerja yang bersifat ekstrim.
 - c. **Konfirmasi, verifikasi dan klarifikasi data kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Teknis Nasional EPPD.**

Tahapan ini dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. EPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus 2020, sedangkan EPPD terhadap LPPD Provinsi dan validasi terhadap hasil evaluasi Tim Daerah EPPD dilaksanakan pada bulan Agustus s/d September 2020.
4. Hasil Notisi Evaluasi dan Kertas Kerja Evaluasi Kabupaten dan Kota yang dihasilkan dari hasil kegiatan EPPD terhadap LPPD Kabupaten dan Kota oleh Tim Daerah disampaikan kepada Tim Teknis Nasional EPPD sebelum Tim Teknis Nasional melakukan evaluasi di Provinsi.
5. Berkenaan dengan butir (3) dan (4) di atas, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Manual Tata Cara EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019 untuk dijadikan acuan bagi para Evaluator yang tergabung dalam Tim Teknis Nasional dan Tim Teknis Daerah EPPD dalam pelaksanaan evaluasi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
6. Penjelasan dan informasi lebih lanjut mengenai Manual Tata Cara EKPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019, dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile: (021) 344 0783 dan email otda.ekpkd@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Drs. Akmal Malik, M.Si



Tembusan :

Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

**MANUAL EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020 TERHADAP LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110**

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota. LPPD tersebut digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih lanjut, hasil evaluasi LPPD juga akan digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semangat yang terkandung baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, sesungguhnya menganut asas penyederhanaan penyusunan pelaporan. Oleh karena itu, Pemerintah kini sedang merumuskan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaannya.

Mengingat pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memerlukan persiapan yang matang serta koordinasi yang intensif antar Kementerian-Lembaga di tingkat Nasional, produk hukum yang akan digunakan untuk mengatur pedoman penyusunan LPPD dan mekanisme evaluasi sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 masih berada dalam proses penyusunan dan harmonisasi di tingkat Nasional. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi tahun 2020 terhadap LPPD tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6976/OTDA tanggal 31 Desember 2019 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6977/OTDA tanggal 31 Desember 2019.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah paling lama 3

bulan setelah tahun anggaran berakhir dan LPPD merupakan sumber informasi utama untuk melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Terkait dengan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :

1. EPPD di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai anggota, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagai anggota, Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota, Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.
2. Tim Nasional dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari para Pejabat Eselon I yang merepresentasikan keanggotaan Tim Nasional. Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Tim Daerah melakukan EPPD kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi setiap tahun.
3. EPPD di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Daerah yang terdiri dari Gubernur selaku penanggungjawab, Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota, Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota, Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota, Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota, Kepala BPS Provinsi sebagai anggota, dan Pejabat daerah lainnya.
4. Tim Teknis dan Tim Daerah EPPD bertugas melakukan EPPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya.
5. Tim Nasional dan Tim Teknis EPPD dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Sekretariat Tim Nasional EPPD yang keanggotaannya terdiri para pejabat yang merepresentasikan keanggotaan Tim Teknis.

II. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6976/OTDA tanggal 31 Desember 2019 kepada Gubernur Seluruh Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6977/OTDA tanggal 31 Desember 2019 kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya Manual Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman/panduan/ acuan bagi para evaluator, baik Tim Teknis EPPD maupun Tim Daerah dalam melaksanakan EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019.

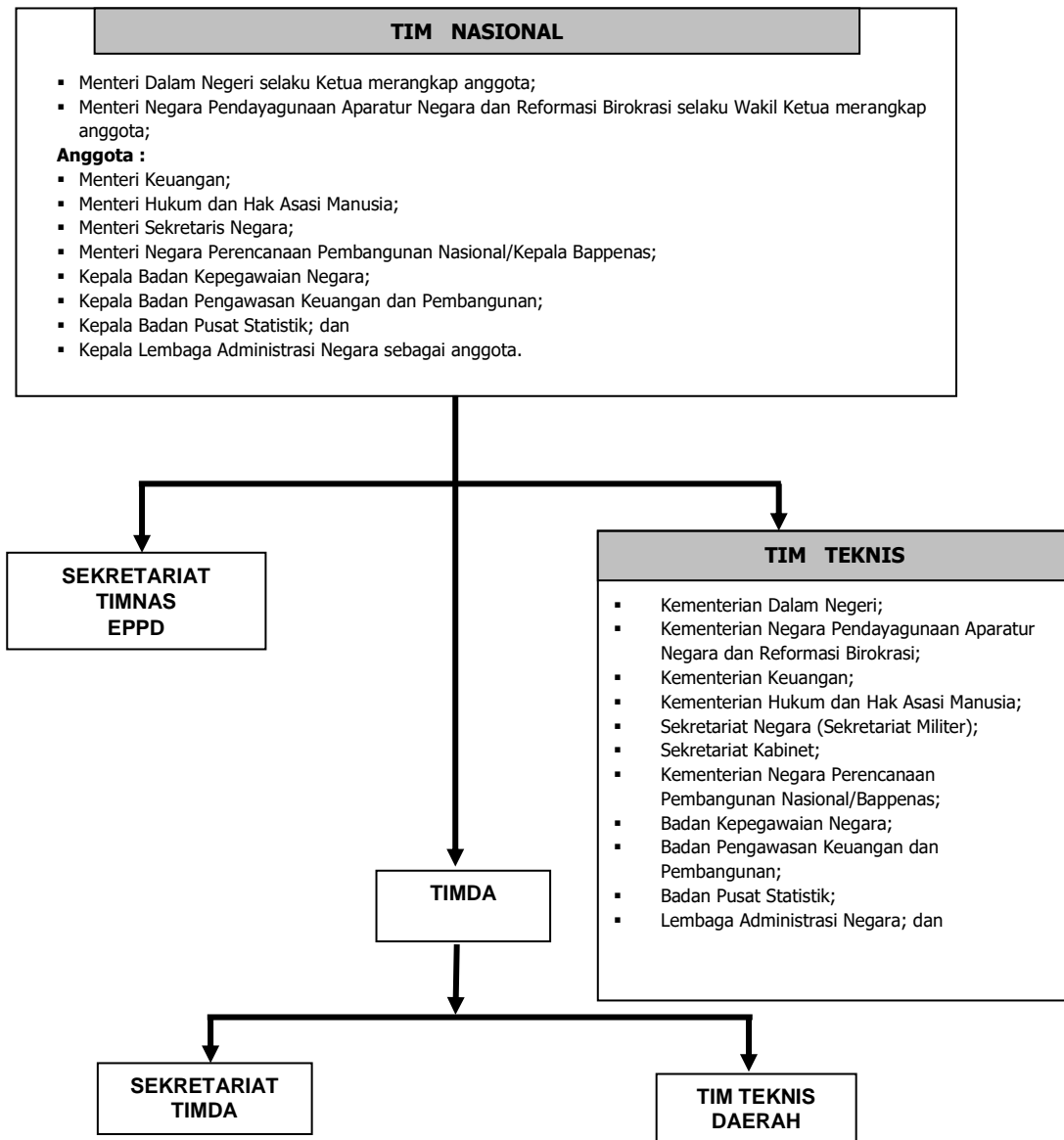
Tujuan diterbitkannya Manual Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah agar terdapat kesamaan pemahaman bagi para evaluator dalam melaksanakan EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD 2019, sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan yang telah ditetapkan sehingga diperoleh hasil evaluasi yang berkualitas dan akurat.

IV. RUANG LINGKUP EVALUASI

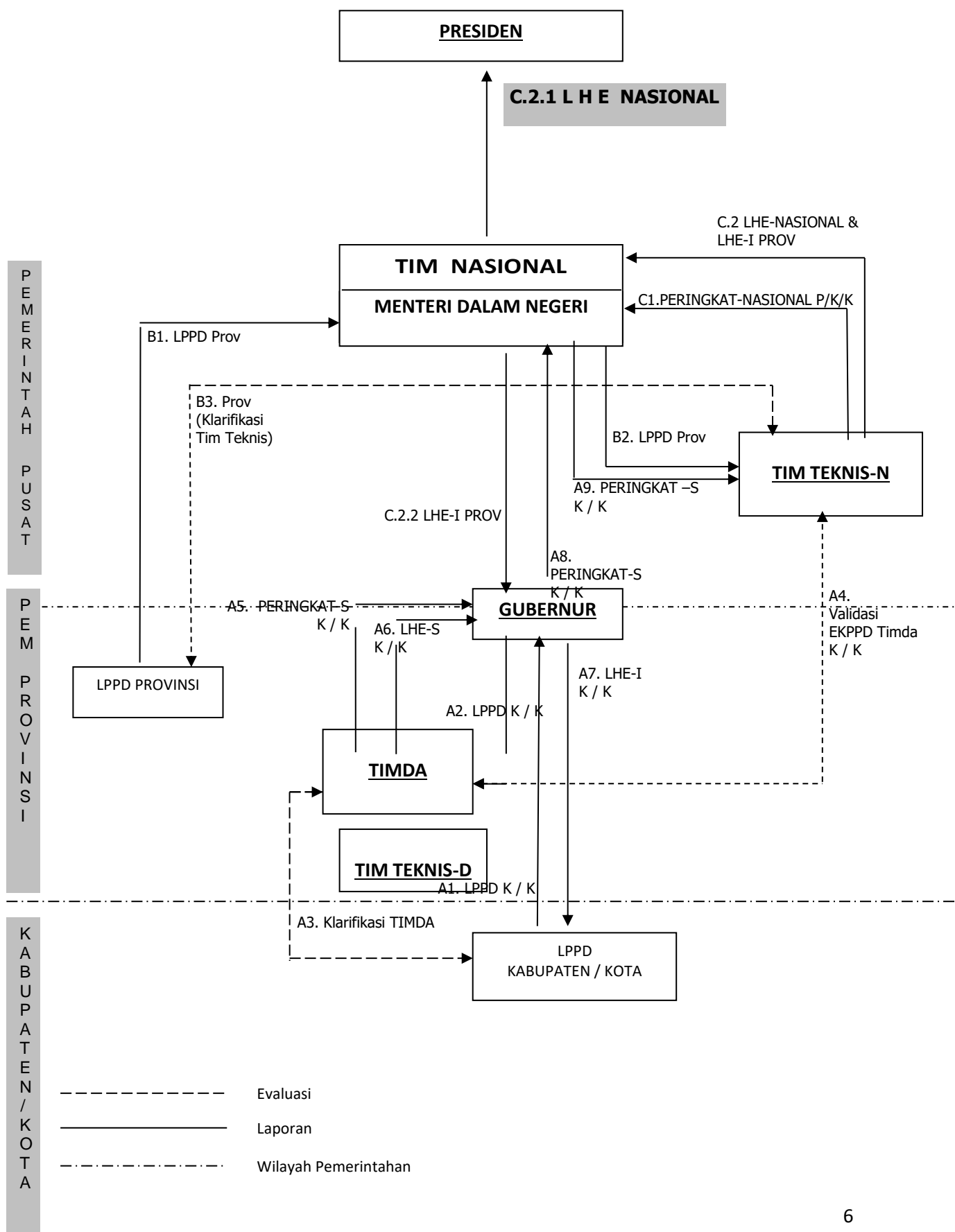
Ruang lingkup Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang sudah berusia di atas 3 tahun **sejak dipimpin oleh kepala daerah yang definitif.**

V. ORGANISASI DAN HUBUNGAN KERJA DALAM PELAKSANAAN EPPD

ORGANISASI TIM EVALUASI EPPD



Hubungan Kerja TIMNAS, TIM TEKNIS dan TIMDA Dalam Pelaksanaan EPPD



VI. JADWAL PELAKSANAAN EVALUASI :

Jadwal pelaksanaan evaluasi direncanakan akan dimulai pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan gambaran sebagai berikut:

No	Aktivitas	Mei				Juni				Juli				Agust					Sept				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan pelaksanaan EPPD: Penyusunan draft manual EPPD Pengumpulan data LPPD																																	
2.	Sosialisasi Manual EPPD 2020 thd LPPD 2019																																	
3.	Tim Daerah melaksanakan inputing data LPPD Kabupaten/Kota (Desk Evaluation)																																	
4.	Tim Nasional melaksanakan inputing data LPPD Provinsi (Desk Evaluation)																																	
5.	Pelaksanaan EPPD Kab/Kota oleh Timda																																	
6.	Pelaksanaan EPPD Prov dan Validasi EPPD Kab/Kota																																	

No	Aktivitas	Mei				Juni				Juli				Agust					Sept				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6.	Rapat Pembahasan hasil EPPD Prov dan Validasi atas Hasil Evaluasi Timda oleh Tim Teknis Nasional																																	
7.	Pemeringkatan Hasil sementara EPPD secara Nasional terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota oleh Tim Teknis Nasional																																	
8.	Rapat Pemeringkatan																																	
9.	Rapat Tim Teknis																																	
10.	Rapat Penyusunan Kepmendagri																																	
11.	Penetapan Kepmendagri																																	

VII. PELAKSANA EVALUASI

1. Evaluasi terhadap LPPD Provinsi dilaksanakan oleh Tim Teknis EPPD yang keanggotaannya terdiri para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, BKN, BPS, Sekretariat Kabinet, LAN dibantu oleh para pakar di bidang pemerintahan. Tim teknis EPPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab penuh kepada Tim Nasional EPPD.
2. Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Daerah EPPD yang keanggotaannya terdiri para pejabat dari Sekretariat Daerah Provinsi, Inspektorat Wilayah Provinsi, BPKP Perwakilan di Provinsi, dan BPS.

VIII. HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi terhadap LPPD tahun 2019 berupa :

1. Pemeringkatan sementara Kabupaten/Kota.
2. Laporan Hasil Evaluasi Individu Sementara atas Hasil EPPD Kabupaten/Kota
3. Pemeringkatan dan status kinerja secara nasional.
4. Laporan hasil evaluasi individu atas hasil EPPD Provinsi.
5. Laporan hasil evaluasi nasional atas hasil EPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota

IX. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil pemeringkatan sementara sesuai dengan Keputusan Menteri yang akan diterbitkan, maka tindak lanjut hasil atas evaluasi adalah:

1. Terhadap **pemerintah** daerah yang dinilai berkinerja tertinggi (3 Provinsi, 10 Kabupaten dan 10 Kota) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha.
2. Terhadap **kepala** daerah yang dinilai berkinerja tertinggi (1 Tahun), diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Laporan Hasil Evaluasi Individu atas hasil EPPD Provinsi disampaikan kembali oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk rekomendasi perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Laporan Hasil Evaluasi Nasional atas hasil EPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota disampaikan kepada Presiden RI dalam bentuk Laporan Menteri Dalam Negeri terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Keseluruhan laporan EPPD disampaikan kepada Sekretariat DPOD untuk diagendakan dalam sidang DPOD terkait kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

A. Tahapan Evaluasi

EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mencermati Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota (*Desk Evaluation*);
2. Melakukan konfirmasi, validasi, verifikasi, dan klarifikasi data.

Tahapan ini akan dibagi menjadi tiga bagian :

- a) Konfirmasi, verifikasi dan klarifikasi data kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh Tim Daerah EPPD. Mekanisme pelaksanaan tahapan ini diserahkan kepada masing-masing Daerah, sesuai dengan kemampuan pembiayaan Daerah.
 - b) Validasi data kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh Tim Nasional EPPD. Tahapan ini dilakukan dengan mekanisme *on-line* dengan menggunakan aplikasi *teleconference* dan berfokus kepada capaian kinerja yang sifatnya ekstrim.
 - c) Konfirmasi, verifikasi dan klarifikasi data kinerja data kinerja Pemerintah Daerah Provinsi oleh Tim Nasional EPPD. Mekanisme pelaksanaan tahapan ini dilakukan melalui mekanisme *on-line* dengan menggunakan aplikasi *teleconference*.
3. Menyusun hasil sementara pemeringkatan sebagai bahan pelaksanaan *Common Senses Survey*;
 4. Melakukan *Common Sense Survey* terhadap daerah yang berdasarkan hasil peringkat sementara EKPPD dinilai berkinerja terbaik sesuai penilaian Tim Teknis EPPD.
 5. Penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional hasil EPPD tahun 2020.

B. Metodologi Evaluasi

Metode Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) provinsi, kabupaten dan kota tahun 2020, dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi.

1. Indeks Capaian Kinerja

Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.

a. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 (tiga belas) aspek yaitu :

- 1) Ketenteraman dan ketertiban umum daerah;
- 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
- 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
- 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
- 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
- 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah;
- 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
- 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
- 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
- 12) Pengelolaan potensi daerah; dan

13) Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setiap aspek dirinci ke dalam beberapa fokus (untuk pemerintah provinsi total 35 fokus dan untuk kabupaten/ kota 36 fokus), dan setiap fokus dirinci ke dalam beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK), untuk pemerintahan provinsi total 39 IKK, Kabupaten 43 IKK dan kota 43 IKK. Pada setiap IKK dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 5, Tinggi (T) = 4, Sedang (S) = 3, Rendah (R) = 2 dan Sangat Rendah (SR) = 1.

- b. Pada tataran Pelaksana Kebijakan meliputi kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 9 (sembilan) aspek, yaitu 8 (delapan) aspek Administrasi Umum dan 1 (satu) aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM. 8 (delapan) aspek administrasi umum meliputi :

- 1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 3) Penataan kelembagaan daerah;
- 4) Pengelolaan kepegawaian daerah;
- 5) Perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Pengelolaan keuangan daerah;
- 7) Pengelolaan barang milik daerah; dan
- 8) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Setiap aspek pelaksana kebijakan akan dirinci ke dalam fokus, dan fokus dirinci lagi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 21 IKK. Setiap IKK dinilai untuk masing-masing urusan dengan memberikan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 5, Tinggi (T) = 4, Sedang (S) = 3, Rendah (R) = 2 dan Sangat Rendah (SR) = 1.

Penilaian 8 (delapan) aspek administrasi umum tersebut di atas diberlakukan terhadap :

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Sosial
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain:
 - a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.

3. Perangkat Daerah yang melaksanakan 8 (delapan) Urusan Pilihan, antara lain:
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Yang termasuk dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah badan (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi penunjang lainnya), fungsi kesekretariatan (sekretariat daerah dan sekretariat DPRD), kantor dan kecamatan.
- c. Pada tataran Pelaksana Kebijakan untuk aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan, dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :
 1. Urusan Wajib. Capaian Kinerja Urusan Wajib terdiri dari:
 - a) 122 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Provinsi.
 - b) 127 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kabupaten.
 - c) 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kota
 2. Urusan Pilihan. Capaian Kinerja Urusan Pilihan terdiri dari:
 - a) 34 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Provinsi.
 - b) 21 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kabupaten.
 - c) 21 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kota.
 3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Capaian fungsi penunjang urusan pemerintahan terdiri dari :
 - a) 17 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Provinsi.
 - b) 17 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kabupaten.
 - c) 17 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kota.

4. Urusan Pemerintahan Umum. Capaian urusan pemerintahan umum terdiri dari :
 - a) 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Provinsi.
 - b) 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kabupaten.
 - c) 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kota.

d. Metode Penilaian Capaian Kinerja

Penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 5, Tinggi (T) = 4, Sedang (S) = 3, Rendah (R) = 2 dan Sangat Rendah (SR) = 1. tersebut diatas dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

Penilaian yang dilakukan terhadap seluruh IKK

- 1.1 Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, misalnya ketepatan waktu penyerahan LPPD, Laporan Keuangan, Penetapan Perda APBD, ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan, dan seterusnya.
- 1.2 Berdasarkan rata-rata nasional, misalnya pertumbuhan ekonomi; angka kemiskinan, angka melek huruf, angka putus sekolah.
- 1.3 Berdasarkan standar yang dirumuskan atau yang disepakati oleh tim teknis EPPD melalui metode normalisasi.

2. Kriteria khusus

- 2.1 Kriteria khusus dilakukan terhadap penilaian SPM yang telah ditetapkan target nasionalnya.
- 2.2 Sebagian IKK tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang belum ada standarnya.

2. Indeks Kesesuaian Materi

Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan sesuai Surat Edaran Nomor 120.04/6976/OTDA tanggal 31 Desember 2019 dan Surat Edaran Nomor 120.04/6977/OTDA tanggal 31 Desember 2019 serta penyempurnaannya sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi: Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum, Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah), terdiri dari:

- a. Penilaian kesesuaian materi untuk Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum disesuaikan dengan perubahan pembagian urusan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang meliputi 6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, inspektorat dan fungsi penunjang lainnya) serta urusan pemerintahan umum (kesbangpol).
- b. Tugas pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan hanya dinilai dari kesesuaian materi sesuai dengan Surat Edaran Nomor 120.04/6976/OTDA tanggal 31 Desember 2019 dan Surat Edaran Nomor 120.04/6977/OTDA tanggal 31 Desember 2019, mengingat tugas yang diterima atau diberikan daerah sangat bervariasi.
- c. Kelengkapan laporan hanya dinilai berdasarkan kesesuaian materi sesuai dengan Surat Edaran Nomor 120.04/6976/OTDA tanggal 31 Desember 2019 dan Surat Edaran Nomor 120.04/6977/OTDA tanggal 31 Desember 2019, untuk menilai konsistensi sistematika pelaporan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada strategi, kebijakan, dan prioritas daerah yang dituangkan dalam RPJMD, sedangkan gambaran umum daerah penting untuk dilaporkan karena menunjukkan potensi daerah serta sumber daya ekonomi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Instrumen Evaluasi

Kebijakan penilaian atas aspek-aspek yang dievaluasi dilakukan dengan pemberian bobot. Pemberian bobot per IKK tiap aspek, tiap fokus, dan tiap indikator berdasarkan pada banyaknya IKK yang ada pada lampiran LPPD Kabupaten/Kota dan banyaknya IKK dan agregasi IKK pada lampiran LPPD Provinsi yang ditetapkan sebagai berikut:

C.1 Pemerintah Provinsi

1. Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 95% terdiri dari aspek :
 - a. Tataran Pengambil Kebijakan, dengan bobot 30% (dari 95%) untuk 13 aspek yang masing masing mendapatkan bobot sebagai berikut:
 - 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah (8%).
 - 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah (12,75%).
 - 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (22%).
 - 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (5,75%).
 - 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (3%).
 - 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (5%).
 - 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (3%).
 - 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (5%).
 - 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (6%).
 - 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah (3%).
 - 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (12,75%).

12) Pengelolaan potensi daerah (5%).

13) Terobosan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (8,75%).

b. Tataran Pelaksana Kebijakan, dengan bobot 70% (dari 95%). Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri dari:

1) 8 aspek Umum untuk 32 urusan, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum dengan bobot 40% (dari 70%). Masing-masing aspek mendapatkan bobot sebagai berikut:

- a) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%)
- b) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%).
- c) Penataan kelembagaan daerah (10%).
- d) Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%).
- e) Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%).
- f) Pengelolaan keuangan daerah (17,50%).
- g) Pengelolaan barang milik daerah (12,50%).
- h) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat (10%).

2) Aspek Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 60% (dari 70%). Untuk Urusan Wajib, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum diberi bobot 80% (dari 60%). Urusan wajib tersebut terdiri dari:

- a) Pendidikan (14%)
- b) Kesehatan (12%)
- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (7%)
- d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (4%)
- e) Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (4%)
- f) Sosial (4%)
- g) Ketenagakerjaan (3%)
- h) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2%)
- i) Ketahanan Pangan (2%)
- j) Pertanahan (2%)
- k) Lingkungan Hidup (3%)

- l) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (2%)
- m) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%)
- n) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (2%)
- o) Perhubungan (2%)
- p) Komunikasi dan Informatika (3%)
- q) Koperasi dan UKM (3%)
- r) Penanaman Modal (2%)
- s) Kepemudaan dan Olahraga (2%)
- t) Statistik (2%)
- u) Persandian (2%)
- v) Kebudayaan (2%)
- w) Perpustakaan (2%)
- x) Kearsipan (2%)

3) Aspek Tingkat Capaian Kinerja, untuk Urusan Pilihan dengan bobot 20% (dari 60%). Kedelapan urusan pilihan yang dimaksud adalah:

- a) Kelautan dan Perikanan (1%)
- b) Pariwisata (1%)
- c) Pertanian (2%)
- d) Kehutanan (2%)
- e) Energi dan SDM (1%)
- f) Perdagangan (2%)
- g) Perindustrian (2%)
- h) Transmigrasi (1%)
- i) Fungsi Penunjang (8%)
- j) Pemerintahan Umum (1%)

2. Kesesuaian materi dengan bobot 5%, yang terdiri atas:
 - a) Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum (65%)
 - b) Tugas Pembantuan (20%)
 - c) Tugas Umum Pemerintahan (10%)
 - d) Kelengkapan laporan (5%)

C.2 Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 95% terdiri dari aspek:
 - a. Tataran Pengambil Kebijakan, dengan bobot 30% (dari 95%) untuk 13 aspek yang masing masing mendapatkan bobot sebagai berikut:
 - 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah (10%).
 - 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah (12%).
 - 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (22%).
 - 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (5%).
 - 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (3%).
 - 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (5%).
 - 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (3%).
 - 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (5%).
 - 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (6%).
 - 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/ obligasi daerah (3%).
 - 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (13%).

- 12) Pengelolaan potensi daerah (5%).
- 13) Terobosan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (8%).

b. Tataran Pelaksana Kebijakan, dengan bobot 70% (dari 95%). Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri dari:

- 1) 8 aspek Umum untuk 32 urusan, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum dengan bobot 40% (dari 70%). Masing-masing aspek mendapatkan bobot sebagai berikut:

- a) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%).
- b) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%).
- c) Penataan kelembagaan daerah (10%).
- d) Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%).
- e) Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%).
- f) Pengelolaan keuangan daerah (17,50%).
- g) Pengelolaan barang milik daerah (12,50%).
- h) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat (10%)

- 4) Aspek Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 60% (dari 70%). Untuk Urusan Wajib, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum diberi bobot 80% (dari 60%). Urusan wajib tersebut terdiri dari:

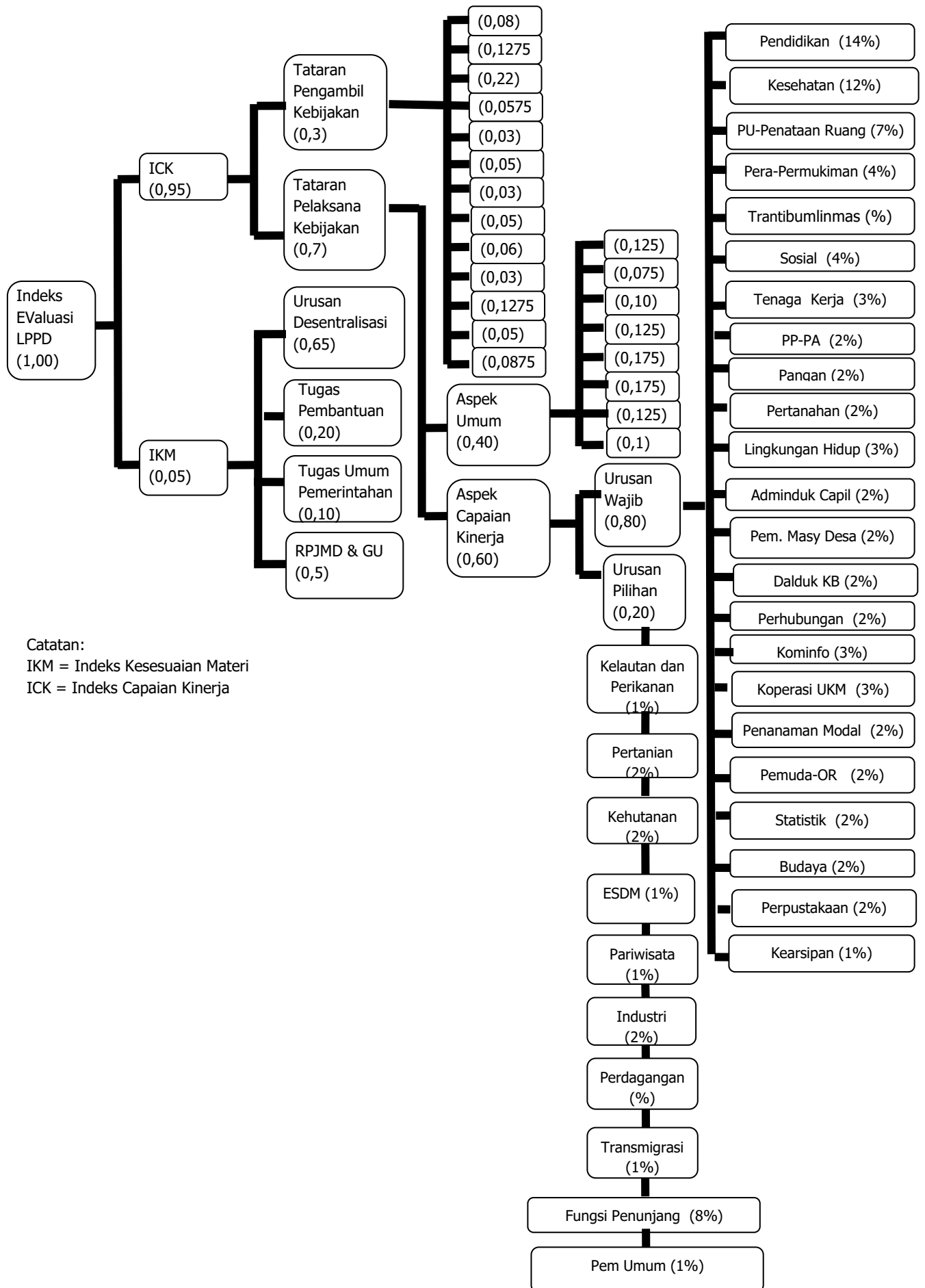
- a) Pendidikan (14%)
- b) Kesehatan (12%)
- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (7%)
- d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (4%)
- e) Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (4%)
- f) Sosial (4%)
- g) Ketenagakerjaan (3%)
- h) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2%)
- i) Ketahanan Pangan (2%)
- j) Pertanahan (2%)

- k) Lingkungan Hidup (3%)
 - l) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (2%)
 - m) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%)
 - n) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (2%)
 - o) Perhubungan (2%)
 - p) Komunikasi dan Informatika (3%)
 - q) Koperasi dan UKM (3%)
 - r) Penanaman Modal (2%)
 - s) Kepemudaan dan Olahraga (2%)
 - t) Statistik (2%)
 - u) Persandian (2%)
 - v) Kebudayaan (2%)
 - w) Perpustakaan (2%)
 - x) Kearsipan (2%)
- 5) Aspek Tingkat Capaian Kinerja, untuk Urusan Pilihan dengan bobot 20% (dari 60%). Urusan pilihan yang dimaksud adalah:
- a) Kelautan dan Perikanan (1%)
 - b) Pariwisata (1%)
 - c) Pertanian (2%)
 - d) Kehutanan (2%)
 - e) Energi dan SDM (1%)
 - f) Perdagangan (2%)
 - g) Perindustrian (2%)
 - h) Transmigrasi (1%)
 - i) Fungsi Penunjang (8%)
 - j) Pemerintahan Umum (1%)

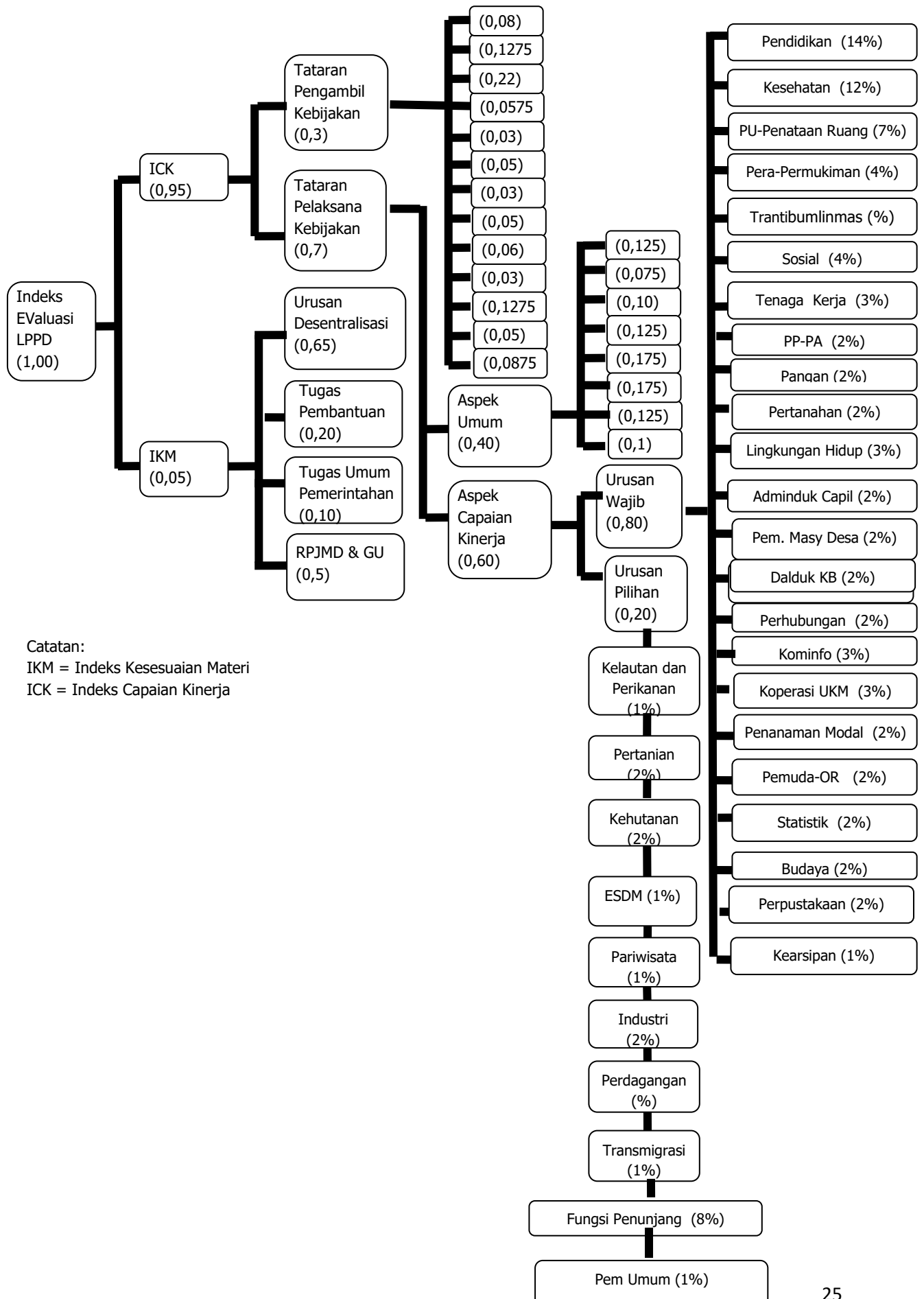
2. Kesesuaian materi dengan bobot 5%, yang terdiri atas:

- a) Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum (65%)
- b) Tugas Pembantuan (20%)
- c) Tugas Umum Pemerintahan (10%)
- d) Kelengkapan laporan (5%)

BAGAN BOBOT INDEKS KOMPOSIT KINERJA PROVINSI



BAGAN BOBOT INDEKS KOMPOSIT KINERJA KABUPATEN/KOTA



D. Prinsip Dasar Evaluasi

EPPD dilaksanakan dengan memberi penilaian prestasi untuk masing-masing IKK yang terdiri dari prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip Umum merupakan penilaian prestasi yang diberlakukan terhadap IKK dengan rumus, perhitungan dan capaian kinerja yang sama, sedangkan Prinsip khusus merupakan penilaian prestasi yang diberlakukan terhadap IKK tertentu.

1. Prinsip Umum

- a. IKK yang capaian kinerjanya tidak diisi (TDI), evaluator agar melakukan klarifikasi data.
- b. IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi "ada" atau "tidak ada"; "tepat" atau "tidak tepat"; "sudah" atau "belum"; "sesuai" atau "tidak sesuai" maka bila jawaban ada/tepat/sudah/sesuai diberi skor = 5 yang secara otomatis dikonversikan oleh sistem aplikasi. Sedangkan untuk jawaban tidak ada/ tidak tepat/ belum/ tidak sesuai diberi skor = 1 yang secara otomatis dikonversikan oleh sistem aplikasi.
- c. IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi "persentase"/ "jumlah"/ "buah"/"kali"/"MoU"/"Ijin"/"Perda", maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahap:
 - 1) Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi.
 - 2) Penentuan nilai maksimum dan minimum.
 - 3) Normalisasi data.
 - 4) Dilakukan rata-rata.
 - 5) Dikelompokkan ke dalam prestasi 5.4.3.2.1.
- d. IKK yang pembilangnya tidak ada atau sama dengan nol dan penyebutnya bilangan jumlah tertentu maka hasilnya adalah nol dan merupakan hasil yang terbaik.

Contoh :

- Aspek Pengambil Kebijakan
Perda yang dibatalkan = 0 ; jumlah perda yang diajukan = 5 perda
Capaian kinerjanya = 0%
- Aspek Pelaksana Kebijakan

Aset yang tidak digunakan = Rp. 0,- Aset yang dikuasai Rp. 100.000.000,- capaian kinerjanya = 0/100 juta rupiah.

2. Prinsip Khusus

a. Pada Tataran Pengambil kebijakan :

IKK yang capaian kinerjanya diisi jenis opini atas Laporan Keuangan tahun 2018 dan 2019, maka pemberian skor untuk "Wajar Tanpa Pengecualian" (2 X WTP) mendapat skor ST= 5, (1 X WTP dan 1X WDP) mendapat skor T = 4, (2 X WDP) mendapat skor S = 3 ; (1 X WDP dan 1X tidak wajar/memberikan pendapat) mendapat skor R = 2.

b. Pada Tataran Pelaksana Kebijakan :

- 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan lebih dari satu urusan harus membuat format lampiran I.2, II.2, III.2 untuk setiap urusan yang dilaksanakan. Sedangkan untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tiga urusan tetapi hanya membuat satu format/kolom (data), harus mengklarifikasi capaian kinerja untuk urusan yang lain.

Contoh:

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) menangani 3 urusan.

Misal: - IKK Aspek 1 "Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD" (Urusan Koperasi) diisi elemen data 2/3, namun apabila untuk urusan Perindustrian dan Perdagangan setelah dilakukan klarifikasi dan validasi tersedia data yang diharapkan, maka dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian/perbaikan. Sebaliknya, apabila tidak dapat menyajikan data yang diharapkan maka untuk kedua urusan tersebut capaian kinerjanya "TDI". Untuk urusan yang tidak mempunyai program nasional seperti urusan "Kearsipan" dan "Transmigrasi" agar langsung diinput 100% pada template untuk keperluan pemeringkatan.

- 2) Satu urusan dilaksanakan oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.

Contoh:

Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedalda) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sama-sama menangani urusan

Lingkungan Hidup, maka capaian kinerja yang diinput adalah hasil rata-rata capaian kinerja dari IKK yang dilaksanakan SKPD yang bersangkutan. Pengisian IKK pada Aspek 3, yaitu "Struktur jabatan dan eselonering yang terisi". Bapedalda mengisi 2/4, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengisi 4/6, maka rata-rata capaian kinerja untuk urusan lingkungan hidup = $(2/4 + 4/6) = 6/10$.

- 3) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, termasuk di antaranya Badan Daerah (kecuali Badan Perencanaan), Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah agar membuat Kertas Kerja terpisah sebelum angka capaian diinput ke dalam template.

Pengisian kertas kerja dilakukan dalam 2 (dua) langkah. Pertama, untuk memperoleh angka capaian di tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan mengisi IKK untuk setiap Perangkat Daerah yang ada kemudian dirata-rata. Angka rata-rata lalu diinput ke dalam template untuk "Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan".

- 4) Data dari Perangkat Daerah yang sebelumnya menangani Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol, Kantor Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah) dimasukkan ke dalam Urusan Trantibumlinmas dalam Lampiran Pelaksana Kebijakan dan Capaian Urusan Pemerintahan.
- 5) IKK yang capaian kinerjanya diisi jenis dokumen perencanaan yang dimiliki yaitu Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, maka untuk Pemerintah Daerah yang mengisi 3 dokumen mendapat skor ST = 5, Pemerintah Daerah yang mengisi 2 dokumen mendapat skor T = 4, Pemerintah Daerah yang mengisi 1 dokumen mendapat skor S = 3, Pemerintah Daerah yang tidak mengisi dokumen perencanaan mendapat skor 0 (skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi).

c. Capaian Kinerja Urusan Wajib/Pilihan

- 1) Untuk IKK tertentu yang capaian kinerjanya semakin tinggi (negatif), nilai prestasinya buruk.

Contoh :

kawasan kumuh, angka putus sekolah dll, maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahapan:

- a) Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi.
- b) Penentuan nilai maksimum dan minimum.
- c) Normalisasi data.
- d) Dilakukan rata-rata.
- e) Dikelompokkan kedalam prestasi 5.4.3.2.1.

- 2) Untuk IKK yang capaian kinerjanya semakin tinggi (positif) semakin bagus.

Contoh :

IKK urusan lingkungan hidup “penegakan hukum lingkungan”, IKK urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang “Rumah tangga pengguna air bersih”, maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahapan:

- a) Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi.
- b) Penentuan nilai maksimum dan minimum.
- c) Normalisasi data.
- d) Dilakukan rata-rata.
- e) Dikelompokkan ke dalam prestasi 5.4.3.2.1.

E. Prosedur Evaluasi

1. Tahapan Evaluasi Pemerintah Kabupaten dan Kota oleh Tim Daerah:

- a. Input data yang sesuai dengan dokumen pendukung pada bagian "Hasil Klarifikasi" kolom "Elemen Data" di dalam aplikasi template individu. Input data sudah harus diselesaikan sebelum Tim Teknis Nasional EPPD melakukan validasi. **Jika input data belum diselesaikan, maka validasi hanya dilakukan terhadap capaian kinerja yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi template individu.**
- b. Template akan secara otomatis akan menghasilkan nilai capaian kinerja untuk masing-masing IKK baik pada lampiran I, II dan III. Pada tahap ini data yang digunakan adalah data yang tertera pada dokumen pendukung. **Jika tidak ada dokumen pendukung, dinyatakan tidak ada informasi atau "TDI".**
- c. Mencetak Kertas Kerja Evaluasi (KKE) untuk ditandatangani oleh evaluator, dilengkapi dengan data pendukung sebagaimana huruf b.
- d. Membuat Berita Acara dan Notisi perihal hasil evaluasi yang menyatakan bahwa evaluasi telah selesai dilakukan dan tidak ada tuntutan setelah evaluasi berakhir (format terlampir).
- e. Menyerahkan seluruh template individu hasil evaluasi kepada Tim Teknis EPPD dalam bentuk berita acara dan notisi melalui email, dengan ketentuan **tidak dimungkinkan lagi Timda melakukan perbaikan KKE dan/atau penyampaian data susulan dari kabupaten/kota pada saat Tim Teknis EPPD melakukan validasi terhadap hasil evaluasi Kabupaten/Kota dan evaluasi terhadap pemerintahan provinsi (kecuali data terkait keuangan daerah yang sudah diaudit, data kinerja yang bersifat ekstrim dan data kinerja makro).**
- f. Menerima hasil pemeringkatan sementara se-wilayah Provinsi dari Tim Teknis EPPD, sebagai hasil penggabungan template Kabupaten/Kota.
- g. Menyusun LHE individu kabupaten dan kota berdasarkan hasil peringkat sementara se-wilayah provinsi sebagaimana dimaksud huruf f, untuk dilaporkan kepada Gubernur.

2. Tugas Tim Teknis EPPD Nasional

- 1) Melakukan identifikasi Indikator Kinerja Kunci dengan capaian kinerja ekstrim berdasarkan Notisi Hasil Pra Evaluasi dan Template Individu Kabupaten/Kota yang dikirimkan oleh Tim Daerah melalui email.
- 2) Melakukan validasi hasil EPPD Timda terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota, **dengan ketentuan validasi hanya dilakukan untuk data yang bersifat ekstrim.**
 - a. Meminta data/dokumen pendukung dari Tim Daerah dalam bentuk soft copy.
 - b. Memvalidasi KKE yang diterima dari Tim Daerah.
 - c. Membandingkan antara KKE dengan data pendukung:
 - apabila tidak sesuai dengan dokumen pendukung, maka data yang digunakan adalah data yang sesuai dengan dokumen pendukung yang telah diserahkan-terimakan.
 - Apabila tidak ditemukan data pendukung maka diisi "Tidak Diperoleh Informasi (TDI)".
 - d. Menyusun hasil validasi terhadap hasil EPPD Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh Tim Daerah.
 - e. Menerima dan menggabungkan seluruh template individu kabupaten dan kota untuk satu wilayah Provinsi, untuk menghasilkan pemeringkatan sementara kabupaten dan kota untuk satu wilayah provinsi.
 - f. Menyerahkan hasil pemeringkatan sementara kepada Tim Daerah dalam bentuk Berita Acara.

3) Melakukan Evaluasi Pemerintahan Provinsi.

A. Desk Evaluation

Pada tahap ini Tim Teknis Nasional EPPD melakukan input elemen data LPPD ke dalam sistem aplikasi template individu pada kolom Elemen Data pada bagian LPPD untuk Tataran Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan Umum dan Pelaksana Urusan Pemerintahan. Input data tersebut dilakukan setelah Provinsi menyampaikan LPPD ke Kementerian Dalam Negeri.

B. Klarifikasi Terhadap LPPD Provinsi

Pada tahap ini Tim Teknis Nasional Melakukan:

- a) Meminta dokumen data pendukung yang dikirimkan masing-masing provinsi melalui email.
- b) Mencermati data pendukung atas seluruh elemen data kinerja.
- c) Input elemen data yang sesuai dengan data pendukung ke dalam sistem aplikasi template individu pada kolom Elemen Data pada bagian Hasil Evaluasi. Apabila tidak ada data pendukung, maka dalam kolom elemen data pada bagian hasil evaluasi diisi "Tidak Diperoleh Informasi" (TDI).
- d) Mendokumentasikan dan mengurutkan data pendukung sesuai dengan IKK, kemudian mengelompokkannya kedalam tataran Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan Umum dan Pelaksana Kebijakan Urusan Pemerintahan.
- e) Mencetak Kertas Kerja Evaluasi (KKE) untuk ditandatangani oleh evaluator, dilengkapi data pendukung sebagaimana huruf c.
- f) Menyampaikan Kertas Kerja Evaluasi kepada Kepala Daerah melalui email.
- g) Pemda menyelenggarakan pertemuan antara Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota, SKPD/Organisasi Perangkat Daerah dan Tim Daerah.
- h) Membuat rapat konsolidasi hasil evaluasi atau kesepakatan dengan Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota melalui aplikasi teleconference.
- i) Membuat Berita Acara dan Notisi perihal hasil evaluasi yang menyatakan bahwa evaluasi telah selesai dilakukan dan tidak ada tuntutan setelah evaluasi berakhir.
- j) Membuat Notisi hasil evaluasi dan rekomendasi khususnya terhadap IKK yang capaian kinerjanya rendah dan TDI.

4) Melakukan pemeringkatan secara nasional.

- a) Melakukan penggabungan template individu provinsi kedalam template gabungan provinsi sebagai dasar penetapan peringkat provinsi secara nasional.
- b) Melakukan penggabungan template individu kabupaten ke dalam template gabungan kabupaten sebagai dasar penetapan peringkat kabupaten secara nasional.
- c) Melakukan penggabungan template individu kota ke dalam template gabungan kota sebagai dasar penetapan peringkat kota secara nasional.
- d) Menyusun LHE Individu Provinsi.
- e) Menyusun LHE Nasional.

F. Dasar penugasan dan Pemeringkatan

1. Dasar Penugasan

- a. Tim Daerah melaksanakan EPPD atas LPPD Pemda Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang disampaikan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan penugasan dari Gubernur selaku penanggungjawab Timda EPPD.
- b. Tim Teknis Nasional EPPD melaksanakan EPPD atas LPPD Pemda Provinsi tahun 2019 yang disampaikan oleh Gubernur, dan melaksanakan validasi hasil EPPD Timda berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Ketua Tim Teknis Nasional EPPD.

2. Pemeringkatan

Pemeringkatan nasional terhadap seluruh provinsi, kabupaten dan kota dilakukan oleh **Tim Nasional EPPD**. Hasil pemeringkatan secara nasional diperoleh dari indeks kinerja berdasarkan hasil EKPPD. Indeks kinerja tersebut merupakan penggabungan antara Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dan Indeks Capaian Kinerja (ICK)

IKM dan ICK secara nasional tersebut diperoleh dari penggabungan seluruh kinerja hasil validasi kabupaten, kota dan seluruh kinerja hasil klarifikasi provinsi ke dalam template gabungan nasional. Untuk IKM

diperoleh dengan menilai kesesuaian materi sesuai dengan Surat Edaran Nomor 120.04/4976/OTDA dan Nomor 120.04/6977/OTDA tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan untuk IKK, secara berjenjang indeks kinerja tersebut dibandingkan antar seluruh pemerintah daerah mulai dari IKK, fokus dan aspek.

Pemeringkatan indeks EPPD Pemerintah Kabupaten dan Kota se-wilayah Provinsi dan Nasional, serta Pemeringkatan indeks EPPD Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan dengan membuat range yang terdiri dari 5 kategori prestasi yaitu:

No	Indeks EKPPD	Prestasi
1	$3,21 \leq \dots \leq 4,00$	Sangat Tinggi
2	$2,41 \leq \dots \leq 3,20$	Tinggi
3	$1,61 \leq \dots \leq 2,40$	Sedang
4	$0,81 \leq \dots \leq 1,60$	Rendah
5	$0,00 \leq \dots \leq 0,80$	Sangat Rendah

Catatan :

Peringkat kabupaten dan kota hasil pemeringkatan sementara dalam satu wilayah provinsi dimungkinkan berbeda dengan urutan kabupaten dan kota hasil pemeringkatan secara nasional, karena :

- 1) Hasil pemeringkatan sementara kabupaten dan kota merupakan penggabungan kinerja antara kabupaten dan kota dalam satu wilayah provinsi saja dan tidak dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya secara nasional.
- 2) Perbandingan dalam Template Gabungan Kabupaten/Kota secara nasional, adalah capaian kinerja dari masing-masing IKK bukan Hasil Indeks Komposit.
- 3) Jumlah populasi data tingkat provinsi lebih sedikit dengan populasi data tingkat nasional, sehingga nilai rata-rata yang dihasilkan dari masing-masing IKK pada template Gabungan Kabupaten/Kota se-wilayah provinsi berbeda dengan yang dihasilkan pada Template Gabungan Kabupaten/Kota secara nasional.

BAB III
PELAPORAN HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (EPPD)

A. Jenis dan Format Laporan Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi terdiri dari:

1. Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) disusun dalam bentuk Buku laporan yang terdiri dari beberapa BAB, untuk masing-masing Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N) pemeringkatan provinsi, kabupaten dan kota secara nasional disusun dalam bentuk Buku laporan yang terdiri dari beberapa BAB.

B. Pelaporan Hasil EPPD Oleh Timda Provinsi

1. Timda EPPD Provinsi melaporkan kepada Gubernur sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Evaluasi Individu masing-masing Kab/Kota
 - b. Laporan pemeringkatan dan status sementara Kab/Kota dalam satu wilayah Provinsi
2. Gubernur menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) masing-masing Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota sebagai umpan balik LPPD.

C. Pelaporan Hasil EPPD oleh Tim Teknis Nasional EPPD

1. Laporan hasil pemeringkatan sementara:
 - a) Sekretariat Tim Nasional EPPD menyusun laporan hasil pemeringkatan sementara EPPD Provinsi/Kabupaten/Kota secara nasional.
 - b) Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) selaku Kepala Sekretariat Tim Nasional EPPD menyampaikan Laporan Hasil Pemeringkatan Sementara EPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, di sidang pleno Tim Teknis Nasional EPPD.
 - c) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Tim Teknis melaporkan hasil sidang Tim Teknis Nasional EPPD kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional EPPD untuk ditetapkan menjadi peringkat dan status kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

2. Laporan Hasil Evaluasi Individu:

- a) Sekretariat Tim Nasional menyusun Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) Provinsi.
- b) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Sekretariat Tim Teknis Nasional EPPD melaporkan LHE-I kepada Menteri Dalam Negeri.
- c) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional EPPD menyampaikan LHE-I ke masing-masing Provinsi kepada Gubernur untuk bahan pembinaan lebih lanjut.

3. Laporan Hasil Evaluasi Secara Nasional:

- a) Sekretariat Tim Nasional EPPD menyusun Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N).
- b) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Sekretariat Tim Teknis Nasional EPPD melaporkan LHE-N kepada Menteri Dalam Negeri;
- c) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Sekretariat Tim Teknis Nasional EPPD menyampaikan LHE-N kepada Anggota Tim Nasional EPPD;
- d) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional EPPD melaporkan hasil evaluasi nasional kepada Presiden berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.

D. Penyampaian Laporan

Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi sebagai berikut:

1. LHE-I Kabupaten/Kota dibuat rangkap 5 (lima), masing-masing disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Dalam Negeri.
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi.
 - c. Inspektur Wilayah Provinsi.
 - d. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.

2. LHE-I Provinsi dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP.
 - c. Peninggal.
3. LHE-N dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden dengan tembusan kepada :
 - a. Masing-masing Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab Urusan.
 - b. Peninggal

BAB IV

PENJELASAN TAMBAHAN

I. Penjelasan Tambahan IKK Provinsi

Beberapa penjelasan tambahan yang dapat diberikan untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi pada Lampiran I, II dan III adalah sebagai berikut:

1) Lampiran I Pengambil Kebijakan Provinsi

- a. IKK Nomor 3 tentang rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk, untuk saat ini yang diperhitungkan adalah personil Satpol PP yang berasal dari PNS.
- b. IKK Nomor 5b tentang ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja sesuai PP No 8 Tahun 2006, dalam rangka efektivitas dan penyederhanaan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 Undang-Undang 23 Tahun 2014.
- c. IKK Nomor 14 tentang keberadaan perda standar pelayanan publik, mengacu tidak hanya pada produk hukum daerah untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, namun juga berbagai Keputusan Kepala Daerah lainnya.
- d. IKK Nomor 18 tentang jumlah perda yang ditetapkan, dalam hal ini mengacu pada keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Propemda) yang sebelumnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Prolegda.
- e. IKK Nomor 19 tentang jumlah Raperda yang disetujui DPRD, dalam hal ini meliputi seluruh raperda.
- f. IKK Nomor 20 tentang "Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti" berdasarkan pada seluruh Keputusan DPRD yang dihasilkan.
- g. IKK Nomor 24 tentang keberadaan Perda tentang konsultasi publik, dalam hal ini lebih menekankan pada kegiatan yang dihadiri publik yang membahas isu/masalah kebijakan publik.

- h. IKK Nomor 34 tentang temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan memperhitungkan jumlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pemda.

2) Lampiran II Pelaksana Kebijakan Provinsi

- a. IKK Nomor 2 tentang keberadaan SOP, yang dimaksud adalah SOP teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- b. IKK Nomor 5 tentang keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah jabatan fungsional teknis terkait dengan urusan yang dilaksanakan.
- c. IKK Nomor 7 tentang pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan. Yang dimaksud dengan pejabat yang telah memenuhi persyaratan adalah pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM dan sudah menjabat.
- d. IKK Nomor 18 tentang ada tidaknya inventarisasi barang/aset SKPD, dalam hal ini inventarisasi aset yang dimaksud adalah inventarisasi atas jumlah aset yang dilaksanakan minimal 5 tahun sekali (sensus barang).
- e. IKK Nomor 21 tentang Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat. Yang diminta Survey Kepuasan Masyarakat pada bidang pelayanan dasar saja. Apabila sudah ditemukan Survey Kepuasan Masyarakat pada bidang pelayanan dasar, maka survey kepuasan masyarakat di bidang lainnya dianggap sudah ada.

3) Lampiran III Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Provinsi

- a. IKK Nomor 1 Pemerintahan Umum tentang Kegiatan Pembinaan Politik Daerah. Yang dimaksud dengan kegiatan pembinaan politik daerah termasuk kegiatan seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti

pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu (Permendagri 36/2010).

- b. IKK Nomor 2 Pemerintahan Umum tentang Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Yang dimaksud dengan kegiatan pembinaan politik daerah termasuk kegiatan seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu (Permendagri 36/2010).

II. Penjelasan Tambahan IKK Kabupaten/Kota

Beberapa penjelasan tambahan yang dapat diberikan untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten/Kota pada Lampiran I, II dan III adalah sebagai berikut:

1) Lampiran I Pengambil Kebijakan Kabupaten/Kota

- a. IKK Nomor 2 tentang rasio Rumah Ber-IMB. Elemen data yang dimasukkan adalah rumah yang memiliki IMB, termasuk ruko (rumah toko).
- b. IKK Nomor 6 tentang rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk, untuk saat ini yang diperhitungkan adalah personil Satpol PP yang berasal dari PNS.
- c. IKK Nomor 10b tentang ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja sesuai PP No 8 Tahun 2006, dalam rangka efektivitas dan penyederhanaan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 Undang-Undang 23 Tahun 2014.
- d. IKK Nomor 19 tentang keberadaan perda standar pelayanan publik, mengacu tidak hanya pada produk hukum daerah untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, namun juga berbagai Keputusan Kepala Daerah lainnya.

- e. IKK Nomor 23 tentang jumlah perda yang ditetapkan, dalam hal ini mengacu pada keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Propemda) yang sebelumnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Prolegda.
- f. IKK Nomor 24 tentang jumlah Raperda yang disetujui DPRD, dalam hal ini meliputi seluruh Raperda baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun yang berasal dari Pemda.
- g. IKK Nomor 25 tentang "Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti" berdasarkan pada seluruh Keputusan DPRD yang dihasilkan.
- h. IKK Nomor 29 tentang keberadaan Perda tentang konsultasi publik, dalam hal ini lebih menekankan pada dasar pelaksanaan konsultasi publik dalam pembentukan Perda yang dibuktikan melalui produk hukum daerah.
- i. IKK Nomor 38 tentang temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan memperhitungkan jumlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pemda.

2) Lampiran II Pelaksana Kebijakan Umum Kabupaten/Kota

- a. IKK Nomor 2 tentang keberadaan SOP, yang dimaksud adalah SOP teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- b. IKK Nomor 5 tentang keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah jabatan fungsional teknis terkait dengan urusan yang dilaksanakan.
- c. IKK Nomor 7 tentang pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan. Yang dimaksud dengan pejabat yang telah memenuhi persyaratan adalah pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM dan sudah menjabat.
- d. IKK Nomor 18 tentang ada tidaknya inventarisasi barang/aset SKPD, dalam hal ini inventarisasi aset yang dimaksud adalah inventarisasi atas jumlah aset yang dilaksanakan minimal 5 tahun sekali (sensus barang).

- e. IKK Nomor 21 tentang Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat. Yang diminta Survey Kepuasan Masyarakat pada bidang pelayanan dasar saja. Apabila sudah ditemukan Survey Kepuasan Masyarakat pada bidang pelayanan dasar, maka survey kepuasan masyarakat di bidang lainnya dianggap sudah ada.

3) Lampiran III Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten/Kota

- a. IKK Nomor 45 tentang Kawasan Kumuh. Pemerintah Daerah harus menetapkan/menyajikan dalam LPPD luas kawasan kumuh di kabupaten dan kota. Kriteria kawasan kumuh antara lain meliputi lingkungan/pemukiman yang tidak tertata, dihuni oleh penduduk tidak tetap/pekerjaan tidak tetap, serta merujuk pada capaian kinerja keluarga pra-sejahtera. (Apabila tidak ada penjelasan maka dianggap TDI).
- b. IKK Nomor 46 tentang Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah. Cara perhitungan : dapatkan jumlah luas wilayah Pemerintah Daerah yang bersangkutan, kaitkan dengan gambaran umum daerah (luas daerah). Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, RTH meliputi: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Pemakaman, Taman Kota, Hutan Kota, Untuk fungsi-fungsi tertentu (jalur hijau sepadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, kawasan perlindungan setempat berupa RTH sepadan sungai, RTH sepadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air)
- c. IKK Nomor 1 Urusan Pemerintahan Umum tentang Kegiatan Pembinaan Politik Daerah. Yang dimaksud dengan kegiatan pembinaan politik daerah termasuk kegiatan seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan

seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu (Permendagri 36/2010).

- d. IKK Nomor 2 Urusan Pemerintahan Umum tentang Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Yang dimaksud dengan kegiatan pembinaan politik daerah termasuk kegiatan seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu (Permendagri 36/2010).
- e. IKK Nomor 133 Urusan Pilihan tentang Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB, yang dimaksud dengan sektor pariwisata dalam PDRB adalah sektor Hotel dan Restoran serta Jasa Hiburan dan Rekreasi.
- f. IKK Nomor 135 Urusan Pilihan tentang Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar. Perhitungan produktivitas adalah perhitungan jumlah produksi padi dan setara padi (jagung, ketela, sagu, gandum dan ubi jalar).

LAMPIRAN 1. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG IKK PROVINSI



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110**

DAFTAR PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PROVINSI
LAMPIRAN I PENGAMBIL KEBIJAKAN

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB	...Kab/kota	yang ada pada lampiran LPPD	FC Perda atau Perkada yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau PTSP
		Jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	...Kab/kota		Jumlah Kab/Kota	
2	Kab/kota memiliki perda tentang Ketertiban Umum	Kab/Kota yang memiliki perda Ketertiban Umum, sebanyak ----- daerah	...Kab/kota		FC Perda Ketertiban Umum	
		Jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD	...Kab/kota		Jumlah Kab/Kota	
3	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2019	orang		FC jumlah personil Satpol PP (PNS) tahun 2019	Sumber data dari BKD
		Penduduk pada akhir tahun 2019	orang		FC jumlah penduduk tahun 2019	Sumber data dari Dinas Dukcapil
4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019	Tanggal Penyampaian LPPD 2019 (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian		FC Bukti Penyerahan LPPD 2019 kepada Kemendagri (Dirjen Otda)	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otda
5	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2019 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian		FC Laporan Keuangan tahun 2019, FC Laporan Kinerja tahun 2019.	Sumber data dari Bagian Keuangan
	Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 2019 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian
6	Pemerintah Daerah yang Memiliki Produk Hukum Daerah tentang Penerapan SPM	Total Kabupaten/Kota yang sudah Memiliki Peraturan Daerah/Perkada tentang Penerapan SPM X100% Rata-rata=urusan=Kab/kota	.. Kab/Kota		agregasi terhadap capaian kinerja jumlah berapa kab/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan yang sudah menerapkan SPM.	1. SPM Pendidikan 2. SPM Kesehatan 3. SPM PU dan Tata Ruang 4. SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. SPM Trantibum dan Linmas 6. SPM Sosial
		Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD	.. Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota	
7	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari:	Mou			Sumber data dari Bagian Pemerintahan Biro Hukum, Setda Pemerintah Provinsi.
		1) MOU dengan-----tentang kerjasama----	MOU		FC jumlah MOU/Nota Kesepahaman atau kerjasama antar daerah yang masih berlaku sampai dengan tahun 2019	
		2) MOU dengan-----tentang kerjasama----MoU			
		dstMoU			
8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional	%		FC Daftar Prioritas Pembangunan Daerah, FC Daftar Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber data dari BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 24(Jumlah urusan wajib di UU No 23 Tahun 2014)X100%	Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/Kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPDX100% Jumlah kabupaten/kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan	% Kab/kota		Agregasi (tidak perlu data pendukung)	
10	Waktu penetapan perda APBD 2019	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2019	tgl penetapan		FC halaman muka dan lembar pengesahan APBD	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD. Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2016.
11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Ada/tidak		FC halaman muka dan lembar pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
12	belanja untuk pelayanan dasar	Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019	Rp		1. FC Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK. 2.Data realisasi bantuan tunai ke lembaga pendidikan dan kesehatan	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
		1. Urusan Pendidikan	Rp			
		2. Urusan Kesehatan	Rp			
		3. Urusan PU dan Tata Ruang	Rp			
		4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp			
		5. Urusan Trantibum Linmas	Rp			
		6. Urusan Sosial	Rp			
		Total Belanja APBD	Rp			

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
13	belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan	Rp		FC Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK,	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Data Diambil dari : - Dinas Pendidikan - Perangkat Daerah lain yang melaksanakan urusan Pendidikan
		1. Urusan Pendidikan	Rp			
		2. Urusan Kesehatan	Rp			
14	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ada/tidak PERDA tentang Standar Pelayanan Publik	Ada/tidak		FC Perda atau Peraturan Kepala Daerah Standar Pelayanan Publik	Sumber data dari Bagian Hukum
15	Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2019	orang		Daftar Jumlah PNS per 31 Desember 2019	Sumber data dari BKD
		Penduduk pada akhir tahun 2019	Jiwa		Daftar Jumlah Penduduk per 31 Desember 2019	Sumber data dari Bagian Dukcapil
16	Persentase PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal D III (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) ... Orang	Orang		FC data jumlah PNS Provinsi tahun 2019 yang memiliki pendidikan tinggi minimal D III (diluar guru dan tenaga kesehatan)	Sumber data dari BKD
		Jumlah PNS Provinsi Tahun 2019 ... orang	Orang		FC jumlah PNS Provinsi Tahun 2019 (diluar guru dan tenaga kesehatan)	
17	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah	Unit		Jumlah pembentukan Perangkat Daerah Berdasarkan PP18 Tahun 2016	Sumber data dari Biro Organisasi
		1. Biro (setda)	Unit			
		2. Dinas	Unit			
		3. Badan	Unit			
		4. Kantor	Unit			
		5. Rumah Sakit	Unit			
		6. Lembaga Teknis lainnya	Unit			
18	Perda yang ditetapkan	Jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2019	Perda		1. FC Daftar Perda	Sumber data dari Bagian Hukum
19	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	Raperda		Daftar Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang	Sumber data dari Bagian Hukum
		RAPERDA yang diusulkan tahun 2019	Raperda		Daftar Raperda yang diusulkan ke DPRD tahun 2019 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang	
20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019	Kep		FC data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2019	Sumber data dari Setwan DPRD dan Bagian Hukum
		Keputusan DPRD dalam tahun 2019	Kep		FC Daftar data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD pada tahun 2019	
21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Keputusan Gubernur tahun 2019 yang ditindaklanjuti	Kep		Daftar Keputusan Gubernur Tahun 2019 yang ditandatangani pejabat berwenang	Sumber data dari Bagian Hukum
		Keputusan Gubernur yang ditetapkan tahun 2019	Kep			
22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Peraturan Gubernur tahun 2019 yang ditindaklanjuti	PerGub		Daftar Peraturan Gubernur Tahun 2019 yang ditandatangani pejabat berwenang	Sumber data dari Bagian Hukum
		Peraturan Gubernur tahun 2019	PerGub			
23	Jumlah PERDA yang dibatalkan	PERDA yang dibatalkan	Perda		Daftar perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh pemerintah yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	Sumber data dari Bagian Hukum
		PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah	Perda			
24	Keberadaan Ada atau tidaknya kegiatan konsultasi publik	kegiatan konsultasi publik	Ada/tidak		FC Perda atau Pergub Tentang Konsultasi Publik/Berita Acara Konsultasi Publik/Notulensi Konsultasi Publik	Sumber data dari Bagian Hukum/Bappeda
25	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Provinsi, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	1. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #1	Media informasi		Print Out Halaman depan Web>Nama Media Informasi dan Dasar hukumnya	Sumber data dari Dinas Kominfo/ Bagian Humas
		Dasar Hukum Pergub	Media informasi			
		3. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #3	Media informasi			

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
		4. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #4	Media informasi			
26	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2019	Rp			
27	Belanja Publik terhadap DAU	Belanja Langsung (Realisasi) Tahun 2019	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		DAU Tahun 2019	Rp			
28	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total Belanja langsung tahun 2018 (realisasi)	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Total Belanja APBD tahun 2018 (realisasi)	Rp			
29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (realisasi)	PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019	Rp			
30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017	WTP, WDP, TMP, TW		7FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Provinsi tahun 2016	Opini,: WTP/ unqualified opinion); WDP/ qualified opinion); TMP/ disclaimer opinion), atau TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion).
		Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018	WTP, WDP, TMP, TW		FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Provinsi tahun 2018	Opini,: WTP/ unqualified opinion); WDP/ qualified opinion); TMP/ disclaimer opinion), atau TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion).
31	Rasio SILPA thdp total pendapatan	SILPA Tahun 2019	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019	Rp			
32	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD Tahun 2019	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Total Pendapatan dalam APBD 2019	Rp			
33	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi Belanja Tahun 2019	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2019	Rp			
34	Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2019	Temuan		1. FC Rekomendasi LHP BPK, 2. FC Rekonsiliasi antara Inspektorat dengan BPK, 3. Perhitungan prosentase/rasio tuntas/tidak tuntas	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti
		Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2019	Temuan			
35	Realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD	Realisasi PAD Tahun 2019	Rp		Laporan Realisasi Anggaran keuangan 2019 setelah Audit BPK RI	Sumber data dari BPKAD
		Potensi PAD Pada tahun 2019	Rp		Potensi PAD yang ada dalam RPJMD	
36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD pada tahun 2019	Rp		Laporan realisasi anggaran 2018 setelah Audit BPK RI	Sumber data dari BPKAD
		Total PAD pada tahun 2018	Rp			
37	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan		FC penghargaan yang diterima pemerintah Provinsi dari pemerintah pusat pada tahun 2019	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan
38	Keberadaan E-procurement	ada/tidak ada E-Procurement	Ada/tidak		FC Perda yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang jasa	Sumber data dari ULP. Data berupa proses e-procurement
39	Jumlah persetujuan investasi	Realisasi ijin Investasi pada Tahun 2019	Izin		Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2018 dan total nilai investasi	Sumber data dari Kantor PTSP (PMDN Nilainya >=500 jt)

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
----	-----	-------------	--------	----------------------	------------------------------	-------------

DAFTAR PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PROVINSI
LAMPIRAN II (PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM)

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	program	yang ada pada lampiran LPPD	FC program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan, nilai anggaran dan realisasinya	
2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)		...buah		FC halamanan muka (cover), halamanan yang menunjukan tahapan-tahapan Prosedur, dan halamanan yang menunjukan ditandatanganinya SOP tsb	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
		Jumlah SOP				
		SOP #1	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #2	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #3	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #4	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #5	Jenis SOP	Teknis		
3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Perda		Photocopy Perda/perkada yg dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah per urusan berdasarkan Peraturan Menteri terkait	
					FC Peraturan Menteri per urusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga	
4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan		Daftar rincian yang menunjukan pejabat struktural yang menangani urusan terkait	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan		FC Struktur organisasi dari Perangkat Daerah khususnya bidang yang menangani urusan terkait	
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan		Daftar rincian yang menunjukan jabatan fungsional teknis yang ada di Perangkat Daerah pada bidang yang menangani urusan terkait berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
		1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional			
		2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fungsional			
		3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fungsional			
		4. Jabatan Fungsional #4	Jab Fungsional			
6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah	orang		Jumlah PNS Perangkat Daerah per urusan	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
		Jumlah PNS Provinsi	orang		Daftar rincian yang menunjukan jumlah PNS Provinsi dari BKD	
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim	orang		Daftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat yang ada yang telah mengikuti Diklat PIM	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
		Jumlah pejabat Perangkat Daerah yang ada	orang		Daftar jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	orang		Daftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
		Jumlah pejabat Perangkat Daerah yang ada	orang		Daftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat Perangkat Daerah yang ada pada urusan terkait	
9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen			Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
	-RENSTRA-Perangkat Daerah	-RENSTRA-Perangkat Daerah	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halamanan yang menunjukkan <u>ditandatangani renstra tsb</u>	
	-RENJA-Perangkat Daerah	-RENJA-Perangkat Daerah	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halamanan yang menunjukkan <u>ditandatangani renja tsb</u>	
	-RKA-Perangkat Daerah	-RKA-Perangkat Daerah	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halamanan yang menunjukkan <u>ditandatangani RKA tsb</u>	
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah	program		Photocopy halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program dari Perangkat Daerah pada urusan terkait	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD	program		FC halaman muka, dan halamanan yang menunjukkan program dari Perangkat Daerah <u>pada urusan terkait</u>	
11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	program		FC halaman muka, dan halamanan yang menunjukkan program dari Perangkat Daerah pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah	program		FC halaman muka, dan halamanan yang menunjukkan program dari Perangkat Daerah pada urusan terkait yang <u>tercantum dalam RKA</u>	
12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	program		FC halaman muka, dan halamanan yang menunjukkan program dari Perangkat Daerah pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019
		Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah	program		FC halaman muka, dan halamanan yang menunjukkan program dari Perangkat Daerah pada urusan terkait yang <u>tercantum dalam DPA</u>	
13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total anggaran belanja APBD	Total anggaran Perangkat Daerah	Rp		FC Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir (Total anggaran)
		Total anggaran belanja APBD	Rp			
14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp			Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Total Realisasi Belanja APBD	Rp			
15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Langsung	Rp			Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp			
16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah	Rp			Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp			
17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen			Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
	- Neraca	- Neraca	ada/tidak		FC halaman muka, dan halamanan yang menunjukkan <u>neraca tsb</u>	
	- LRA	- LRA	ada/tidak		FC halaman muka dan halamanan yang menunjukkan LRA	
	- CALK	- CALK	ada/tidak		FC halaman muka dan satu atau dua halamanan yang menunjukkan CALK	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
18	Adanya inventarisasi barang / aset Perangkat Daerah	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset Perangkat Daerah 5 tahun terakhir	ada/tidak		FC sensus barang 5 tahun	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah aset yang tidak digunakan Perangkat Daerah	Rp		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan atau digunakan oleh pihak lain	Pembilang: Sumber data berasal dari BPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset)
		Total Aset yang dikuasai Perangkat Daerah	Rp		Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai Perangkat Daerah	Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah			Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak		Foto	
	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	ada/tidak		Foto	
	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak		FC Leaflet	
	4. Mobil keliling dan/atau angkutan lainnya	4. Mobil keliling dan/atau angkutan lainnya	ada/tidak		Daftar Inventaris	
	5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak		Foto	
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	ada/tidak		FC surat penetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait, dan FC Cover Hasil Survey	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

DAFTAR PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PROVINSI
LAMPIRAN III (PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN)

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI%	yang ada pada lampiran LPPD	FC Daftar Rincian jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI	Sumber data Dinas Pendidikan/Sosial
		Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI			FC Daftar Rincian jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI	Sumber data Dinas Pendidikan/Sosial
2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS%		FC Daftar Rincian jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS	Sumber data Dinas Pendidikan/Sosial
		Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS			FC Daftar Rincian jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS	
3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA%		FC Daftar Rincian jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA	Sumber data Dinas Pendidikan/Sosial
		Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA			FC Daftar Rincian jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA	
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK%		FC Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Dukcapil
		Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 -18 tahun			FC jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	
5	Tingkat Partisipasi Warga Negara Perempuan Usia 16 – 18 Tahun dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Siswa Perempuan Usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK%		FC Jumlah anak perempuan usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas	
		Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Usia 16 -18 Tahun			Jumlah Penduduk usia 16-18 Tahun	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
6	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA%		FC data jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	Sumber data Dinas Pendidikan
		Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya%		FC data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA yang mengikuti ujian	
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA%		FC data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat jenjang SMA/SMK/MA	Sumber data Dinas Pendidikan
		Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran (berjalan) sebelumnya			FC data jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs, tahun ajaran sebelumnya.	
8	Angka Melanjutkan (AM)dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA%		FC data jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Sumber data Dinas Pendidikan
		Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya			FC data jumlah sekolah jenjang SMA/SMK/MA	
9	Tingkat Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA berakreditasi A atau B	Jumlah Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA terakreditasi A/B%		FC data jumlah sekolah jenjang SMA/SMK/MA terakreditasi A/B	Sumber data Dinas Pendidikan
		Jumlah Sekolah Jenjang SMA/SMK			FC data jumlah sekolah jenjang SMA/SMK/MA	
10	Pendidik Pada Pendidikan Khusus (SLB) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Pendidikan Khusus yang Memiliki Ijazah minimal (D-IV) atau (S1) dan Sertifikat Pendidik%		FC data jumlah pendidik pada jenjang pendidikan khusus yang memiliki ijazah minimal (D-IV) atau (S1) dan Sertifikat Pendidik	Sumber data Dinas Pendidikan
		Jumlah Guru jenjang Pendidikan Khusus				
11	Pendidik Pada Jenjang (SMA/SMK/MA) yang Memiliki Ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Pendidikan (SMA/SMK/MA) yang Memiliki Ijazah minimal (D-IV) atau (S1) dan Sertifikat Pendidik%		FC data jumlah pendidik pada jenjang pendidikan menengah yang memiliki ijazah minimal (D-IV) atau (S1) dan Sertifikasi Pendidik	Sumber data Dinas Pendidikan
		Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA			FC data jumlah guru jenjang SMA/SMK/MA	
12	Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan Khusus yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Khusus yang Memiliki Ijazah minimal (D-IV) atau (S1), Sertifikat Pendidik, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah%		fc data jumlah Kepala Sekolah pada jenjang pendidikan khusus yang memiliki ijazah minimal (D-IV) atau (S1), Sertifikat Pendidik, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	Sumber data Dinas Pendidikan
		Jumlah Kepala Sekolah jenjang Pendidikan Khusus			fc data Kepala Sekolah jenjang Pendidikan Khusus	
13	Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan Menengah yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah yang Memiliki Ijazah minimal (D-IV) atau (S1), Sertifikat Pendidik, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan%		FC data jumlah kepala sekolah pendidikan menengah yang memiliki ijazah minimal (D-IV) atau (S1), sertifikat pendidik,	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah Kepala Sekolah jenjang Pendidikan Menengah			FC data jumlah kepala sekolah jenjang pendidikan menengah	
14	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di provinsi%		FC data daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi	
		Jumlah Penduduk Provinsi			FC data Jumlah Penduduk Provinsi	
15	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi minimal Tingkat Utama%		FC Data jumlah Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi minimal Tingkat Utama	
		Jumlah Rumah Sakit Provinsi			FC Data Jumlah seluruh Rumah sakit Provinsi	
16	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun%		FC Data jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurungan waktu satu tahun	
		Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama			FC Data jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama	
17	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar%		FC Data orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
		Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB			FC Data Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	
18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan%		FC data rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk provinsi	
		Jumlah Penduduk Provinsi			data jumlah seluruh kabupaten dan kota	
19	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
20	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
21	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
22	Cakupan Balita Gizi Buruk dan Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
25	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
26	Cakupan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
28	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
29	Cakupan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
30	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
31	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
32	Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota			Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
33	Cakupan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
35	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik %		data panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang terkait	Sumber data dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait
		Panjang seluruh jalan Provinsi			data panjang seluruh jalan provinsi di provinsi tersebut	
36	Presentase Panjang Jalan Provinsi yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Panjang jalan Provinsi yang direhabilitasi/direkonstruksi%		data panjang jalan provinsi yang direhabilitasi/direkonstruksi	
		Panjang Jalan Provinsi yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi			data panjang seluruh jalan provinsi di provinsi tersebut	
37	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi (ha)%		data jumlah luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan provinsi(ha)	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Provinsi (ha)			data luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Provinsi (ha)	
38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi (ha)%		data jumlah luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai (WS) kewenangan provinsi	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi (ha)			data jumlah luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan provinsi (ha).	
39	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting%		FC Data Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	
		luas daerah irigasi kewenangan provinsi			FC Data luas daerah irigasi kewenangan provinsi dikali 100%.	
40	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota%		FC Daftar Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	
		Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan			FC data Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	
41	Ketersediaan Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD)	Ada atau tidaknya Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD)	Ada atau tidak		ada atau tidak Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD)	
42	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional%		FC Data Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional			FC Data Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional	
43	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli%		FC Data Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi			FC jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	
44	Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota			Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
45	Rumah Tangga Pengguna air bersih	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
46	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani%		FC data jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani			FC data jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
47	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni%		FC data jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan			FC data Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	
48	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 s.d 15 Ha yang ditangani	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 s.d 15 Ha yang ditangani%		FC Data Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas kawasan kumuh 10-15 Ha			FC Data Luas kawasan kumuh 10-15 Ha	
49	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU%		FC data jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah satuan perumahan (Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota)				
50	Rumah Layak Huni	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
51	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan%		FC Data Jumlah pengaduan yang diselesaikan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk			FC Data Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	
52	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan%		FC Daftar Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi			FC Daftar Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	
53	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun%		FC Data Jumlah Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun			FC Data Jumlah Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun	
54	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana%		FC Data Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi			FC data Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi	
55	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana%		FC Data Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana			FC data Jumlah kabupaten/kota yang mengalami bencana di wilayah Provinsi	
56	Persentase Personil Satpol PP Berkualifikasi PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualifikasi PPNS%		FC Data jumlah personil Satpol PP berkualifikasi PPNS	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Personil Satpol PP			FC Data jumlah personil Satpol PP	
57	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya%		FC data jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti			FC Data jumlah populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
58	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya%		FC data jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti			FC data jumlah populasi anak terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	
59	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya%		FC data jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti			jumlah populasi lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	
60	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya%		FC data jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti			FC jumlah populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	
61	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya%		FC data jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi			FC jumlah populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	
62	Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah		FC data jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti.	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
63	Tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Jumlah		FC data jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, pekerja sosial medis) yang disediakan di dalam panti	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
64	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja%		FC data jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Kabupaten/Kota				
65	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan				
66	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)%		FC data PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah tenaga kerja			FC data Jumlah tenaga kerja	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
67	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah Perusahaan				
68	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan%		FC data Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pencaker yang terdaftar			FC data jumlah pencari kerja yang terdaftar	
69	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Σ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan%		FC data Jumlah total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Σ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan			FC data total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan	
70	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial				

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
71	(Persentase) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi%		FC data Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari pemerintah provinsi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta			FC data jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta	
72	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD%		FC data Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi			FC data jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi	
73	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi			FC data Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)			FC Data Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	
74	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan			Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah penduduk perempuan				
75	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
76	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan provinsi%		FC data jumlah cadangan pangan Provinsi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah kebutuhan pangan provinsi			FC data jumlah kebutuhan pangan Provinsi	
77	Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada atau tidak		FC data infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
78	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi%		FC data Jumlah luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi			FC data jumlah seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	
79	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu%		FC data Jumlah luas pengadaan tanah untuk umum selesai tepat waktu	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas (Perencanaan) pengadaan tanah untuk kepentingan umum			FC data jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum	
80	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota.	Luas pemanfaatan yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi lintas kab/ kota%		FC data jumlas luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya di atas izin lokasi lintas kabupaten/kota	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas izin lokasi yang diterbitkan			FC jumlah izin lokasi yang diterbitkan	
81	Luas lahan bersertifikat	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
82	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air			1. FC data indeks Kualitas / Pencemaran Air	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara			2. FC data indeks Kualitas / Pencemaran Udara	
		3. Indeks Tutupan Hutan/Lahan			3. FC data indeks Tutupan Hutan/Lahan	
83	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi%		FC Data jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah provinsi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan			FC Data Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	
84	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi%		FC Daftar Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi			FC Daftar jumlah ijin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
85	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Provinsi	Total vol sampah yang dapat ditangani%		FC data total vol sampah yang dapat ditangani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Total vol timbunan sampah Regional/Provinsi			FC data total vol timbunan sampah Regional/Provinsi	
86	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Hidup%		FC data jumlah Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup			FC data jumlah Kasus Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup	
87	Persentase penduduk yang telah melakukan perekaman	Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah penduduk				
88	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 - 18 tahun	Jumlah anak (0-18 tahun) yang sudah memiliki akta kelahiran%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah anak 0-18 tahun				
89	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)				
90	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)				
91	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-49 tahun)			FC data jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-49 tahun)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -49 tahun)			FC data jumlah Perempuan Usia Subur (15 -49 tahun)	
92	Angka Kelahiran bagi Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-19 tahun)			Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -19 tahun)				
93	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern%		FC data jumlah peserta KB Aktif Modern	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Pasangan Usia Subur			FC data jumlah Pasangan Usia Subur	
94	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani%		FC data jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Pasangan Usia Subur			FC data jumlah Pasangan Usia Subur	
95	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)			FC Penghitungan rasio konektivitas provinsi sesuai rumus yang telah ditetapkan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
96	Kinerja lalu lintas provinsi	V/C Ratio di Jalan Provinsi			FC data v/c Ratio di jalan provinsi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang
97	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo%		FC data jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah OPD			FC data jumlah Perangkat Daerah	
98	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi%		FC data Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Layanan Publik			FC data Jumlah Layanan Publik	
99	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi%		FC data jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penduduk			FC data Jumlah penduduk	
100	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada atau tidak		FC data ada atau tidak tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
101	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi%		FC data jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi			FC data jumlah ASN pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi kompetensi	
102	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh koperasi				
103	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha%		FC data jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah usaha kecil keseluruhan			FC data jumlah usaha kecil keseluruhan	
104	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah usaha kecil keseluruhan				
105	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi%		FC data jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Koperasi seharusnya mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dalam 1 Provinsi			FC data jumlah koperasi seharusnya mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam 1 Provinsi	
106	Koperasi aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota				
107	Persentase peningkatan investasi di provinsi	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi%		FC data (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi			FC data Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi	
108	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi				
109	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di provinsi%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi				
110	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	jumlah		FC data jumlah perolehan medali pada event olah raga pada tahun 2019	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
111	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan%		FC data jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi			FC data jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya memiliki kompetensi	
112	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah%		FC data jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		jumlah OPD			FC data jumlah OPD	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
113	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah%		FC data jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		jumlah OPD			FC data jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	
114	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi%		FC Data Jumlah nilai per area keamanan informasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah area penilaian			FC Data Jumlah area penilaian	
115	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan				
116	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah		FC data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
117	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	(Bersarkan hasil survey, dengan variable utama, frekuensi membaca perminggu, lama waktu membaca, jumlah buku yang ditamatkan pertahun)			FC data nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
118	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			FC daftar indeks pembangunan Literasi Masyarakat	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
119	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah%		FC koleksi judul buku di perpustakaan daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah			FC data koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	
120	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			FC data tingkat ketersediaan arsip	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
121	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK			FC data tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
122	Pengelolaan Arsip secara baku	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku%		FC data jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kantor arsip daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Perangkat Daerah			FC data jumlah perangkat daerah	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
123	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah		FC data jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
124	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku c _i : jumlah pelaku usaha KP yang patuh s _i : jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP%		FC data persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
125	Exspor hasil perikanan	Nilai export hasil perikanan (ton pertahun)%		FC data nilai ekspor perikanan per tahun	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Target daerah			FC target ekspor perikanan daerah	
126	Konsumsi ikan	Realisasi Konsumsi Ikan%		FC data realisasi Konsumsi Ikan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Target Konsumsi Ikan			FC data target Konsumsi Ikan	
127	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) Jumlah wisatawan tahun n-1%		FC data (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) FC data jumlah wisatawan tahun n-1	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
128	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) Jumlah wisatawan tahun n-1%		FC data (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) FC data Jumlah wisatawan tahun n-1	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
129	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual Jumlah kamar yang tersedia%		FC data jumlah kamar yang terjual FC data jumlah kamar yang tersedia	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
130	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata%		FC data Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PDRB			FC Jumlah total PDRB	
131	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		Luas panen				
132	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian/penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
133	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2019	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian%		FC data Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PDRB			FC Jumlah total PDRB	
134	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal jumlah total usulan KTH yang terintegrasi%		FC data Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal FC jumlah total usulan KTH yang terintegrasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
135	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak (ha) Jumlah hutan keseluruhan (ha)%		FC data jumlah hutan yang rusak FC data jumlah hutan keseluruhan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
136	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) Luas Lahan Kritis di provinsi (ha)%		FC jumlah Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) FC jumlah luas lahan kritis	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
137	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda%		FC data Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi			FC jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi	
138	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Jumlah desa yang teraliri listrik%		FC data jumlah jumlah desa yang teraliri listrik	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah desa			FC data jumlah desa	
139	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2019	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan%		FC data Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PDRB			FC Jumlah total PDRB	
140	PERDA/PERGUB terkait izin penggalan, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi		Ada atau tidak		FC data perda/pergub terkait izin penggalan, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
141	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya%		FC data jumlah nilai ekspor non migas tahun berjalan-nilai ekspor non migas tahun sebelumnya	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya			FC data jumlah nilai ekspor non migas tahun sebelumnya	
142	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan%		FC data jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan			Fc pula data jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan.	
143	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan%		FC data jumlah sampel yang sesuai ketentuan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun			FC data jumlah sampel yang di uji dalam satu tahun	
144	Tertib Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB%		data jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pelaku usaha MB TBB			data jumlah pelaku usaha MB TBB	
145	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi%		Agregasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)				
146	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan%		FC data jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah barang beredar yang diawasi			Fc data jumlah barang beredar yang diawasi	
147	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember%		FC data jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
148	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan%		FC data jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PDRB			FC data jumlah total PDRB	
149	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	(Jumlah Industri besar tahun n - Jumlah industri besar tahun n-1)%		FC data jumlah industri besar tahun n- jumlah industri besar tahun n-1	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah industri besar tahun n-1			FC data Jumlah industri besar tahun n-1	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
150	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan%		FC data jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah izin yang dikeluarkan			FC data jumlah izin yang dikeluarkan	
151	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Jenis Industri Prioritas Provinsi%		FC data jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional				
152	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan%		FC data jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah izin yang dikeluarkan			FC data jumlah izin yang dikeluarkan	
153	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan%		FC data jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah izin yang dikeluarkan			FC data jumlah izin yang dikeluarkan	
154	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong 5. Informasi bahan bakar/ energy 6. Informasi tenaga kerja 7. Informasi investasi		Ada/ Tidak Ada	FC data informasi industri secara lengkap dan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
155	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2019	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri			FC data jumlah kontribusi PDRB dari sektor perindustrian	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PDRB			FC data jumlah total PDRB	
156	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya			FC data jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Jumlah		FC jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD%		FC data mengenai Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan			FC jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	
3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan%		FC data mengenai Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah APBD			FC data mengenai Jumlah APBD	
4	Rasio PAD	Jumlah PAD	...%		FC data mengenai Jumlah PAD	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah PDRB non migas			FC data mengenai Jumlah PDRB non migas	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	...%		FC data mengenai Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		jumlah belanja APBD			FC data mengenai Jumlah belanja APBD	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP			FC data Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat Provinsi
7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP			FC data Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat Provinsi
8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	...%		FC Dapatkan jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	Sumber data LPSE
		jumlah kontrak keseluruhan tahun n			FC data jumlah kontrak keseluruhan tahun n	
9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	...%		FC jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Sumber data LPSE
		Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif			FC data Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	
10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	...%		FC Data nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Sumber data LPSE
		Total belanja langsung			FC data Total belanja langsung	
11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	...%		FC jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan);	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			FC data Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);	
12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	...%		FC data Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			FC Data Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	
13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	...%		FC Data Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Total belanja APBD dikurangi satu			FC Data Total belanja APBD dikurangi satu	
14	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)			1. FC Data Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. FC Data Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. FC Data Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
15	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SILPA	...%		FC Data Nilai Realisasi SILPA	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya			FC Data Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	
16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	...%		FC Daftar Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = (Rumus terbalik)			FC Data Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	
17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	Jumlah		FC Data Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		total jumlah dokumen yang telah dirinci			FC Data total jumlah dokumen yang telah dirinci	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
Urusan Pemerintahan Umum/Trantibumlinmas						
1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	Kegiatan		FC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan politik daerah selama tahun 2019 ditandatangani oleh pejabat terkait	Sumber data dari Dinas Kesbangpol/Perangkat Daerah yang menangani
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan		FC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP selama tahun 2019 yang ditandatangani oleh pejabat terkait	Sumber data dari Dinas Kesbangpol/Perangkat Daerah yang menangani

LAMPIRAN 2. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG IKK KABUPATEN/KOTA



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110**

DAFTAR PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG KABUPATEN						
LAMPIRAN I PENGAMBIL KEBIJAKAN						
NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Keberadaan Perda IMB	Ada/tidak adanya Perda IMB	Ada/tidak	Yang ada pada Lampiran LPPD	FC Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur perizinan tentang izin mendirikan bangunan	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
2	Rasio Rumah ber-IMB	Jumlah rumah ber-IMB	%		FC Jumlah rumah ber-IMB sd akhir tahun 2019	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
		Jumlah seluruh rumah			FC Jumlah rumah sd akhir tahun 2019	
3	Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum	Ada/tidak ada PERDA Ketertiban Umum	Ada/tidak		FC Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang ketertiban umum	Sumber data dari Bagian Hukum
4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang terekam dalam e-KTP %		FC jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP	Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
		Jumlah penduduk wajib KTP			FC jumlah penduduk wajib KTP	
5	Pengurusan KIA	Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA %		FC Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA	Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA			FC jumlah anak yang seharusnya memiliki KIA	
6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2019			FC jumlah personil Satpol PP tahun 2019	Sumber data dari BKD dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Penduduk pada akhir tahun 2019	Jiwa		FC jumlah penduduk tahun 2019	
7	Keberadaan PERDA tentang Penanganan Bencana	Ada atau tidak ada PERDA Penanganan Bencana	Ada/tidak		Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor: -----Tahun----- tentang----(yang mengatur Penanganan Bencana)	Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum
8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada/tidak adanya Perda tentang Kebersihan Kota	Ada/tidak		Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor: -----Tahun----- tentang----(yang mengatur Kebersihan Kabupaten)	Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan
9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019	Tanggal Penyampaian LPPD 2019 (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian		FC Bukti Penyerahan LPPD 2019 kepada Provinsi	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otonomi Daerah
10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2008	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2019 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian		FC Bukti Penyerahan Laporan Keuangan Kabupaten/Kota TA 2019 kepada Kementerian Keuangan RI	Sumber data dari Bagian Keuangan
11	Pemerintah Daerah yang Memiliki Peraturan tentang Penerapan SPM	Ada atau tidaknya Peraturan tentang penerapan SPM	Ada/tidak		FC Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang SPM	Sumber data dari Bagian Hukum
12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak -----MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan-----tentang kerjasama----- 2) MOU dengan-----tentang kerjasama----- -.MOU		FC data jumlah MOU/Nota Kesepahaman atau kerjasama antar daerah yang masih berlaku sampai dengan tahun 2019	sumber data dari Bagian Pemerintahan
13	Kesesuaian prioritas pembangunan nasional	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional %		FC data jumlah prioritas pembangunan daerah	Sumber data dari Bappeda/Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Prioritas pembangunan nasional			data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2019	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
14	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2019%		FC data jumlah urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah	Sumber data dari Bappeda/Perangkat Daerah yang bersangkutan (Sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2019)
		Jumlah urusan wajib di UU23/2014			FC data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2019	
15	Waktu penetapan perda APBD 2018	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2019	tepat/ tidak tepat		FC halaman muka dan lembar pengesahan APBD	Sumber data dari Bappeda/BPKAD
16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Ada/ tidak ada		FC halaman muka dan lembar pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Sumber data dari Bappeda/BPKAD
17	Belanja untuk pelayanan dasar	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan KesehatanRp. ----- 3) Urusan PU dan Penataan Ruang Rp. -- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp. 5) UrusanTrantibum dan LinmasRp. ----- 6) Urusan SosialRp.%		1. FC Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK. 2.Data realisasi bantuan tunai ke lembaga pendidikan dan kesehatan	Sumber data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit)
18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019. 1. Urusan Pendidikan	Rp		FC Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK,	Sumber data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit)
		2. Urusan Kesehatan	Rp			
19	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Ada/ Tidak ada		FC Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik	Sumber data dari Bagian Hukum
20	Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019			FC data jumlah PNS s.d 31 Desember 2019	Sumber data dari BKD dan instansi terkait
		Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2019			FC data Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2019	Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
21	Rasio PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Tesehatan)	Jumlah PNS kabupaten tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)			Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)	Sumber data dari BKD
		Jumlah PNS Kabupaten Tahun 2019			FC data jumlah PNS Kabupaten Tahun 2019	
22	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah,sbb: 1) Bagian (Setda) = -----unit 2) Dinas = -----unit 3) Badan = -----unit 4) Kantor = -----unit 5) RumahSakit = -----unit 6) LembagaTeknis lainnya = -----unit 7) Kecamatan/Distrik = -----unit -Jumlah Perangkat Daerah = -----unitunit		Jumlah pembentukan Perangkat Daerah Berdasarkan PP18 Tahun 2016	Sumber data dari Bagian Ortala
23	PERDA yang ditetapkan	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019	... PERDA		FC data jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2019	Sumber data dari Bagian Hukum
24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	RAPERDA yang disetujui tahun 2019	...%		FC data jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	Sumber data dari Bagian Hukum
		RAPERDA yang di usulkan DPRD tahun 2019			FC data jumlah Raperda yang diusulkan ke DPRD tahun 2019 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	
25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019	...%		FC data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2019	Sumber data dari Sekretaris Dewan
		Keputusan DPRD dalam tahun 2019			FC Daftar data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD pada tahun 2019	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
26	Keputusan kabupaten yang ditindaklanjuti	Keputusan kabupaten yang ditindaklanjuti tahun 2019	...%		FC data jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2019	Sumber data dari Bagian Hukum
		Keputusan walikabupaten tahun 2019 yang diusulkan			FC data jumlah Keputusan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2019	
27	Peraturan kabupaten yang ditindaklanjuti	Keputusan Gubernur tahun 2018 yang ditindaklanjuti	...%		FC data jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2019	Sumber data dari Bagian Hukum
		Peraturan kabupaten dalam tahun 2019			FC data jumlah Peraturan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2019	
28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah Perda yang dibatalkan	...%		FC data mengenai perda-perda yang dibatalkan	Sumber data dari Bagian Hukum
		Jumlah Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah			FC data perda-perda yang dikirimkan untuk dievaluasi	
29	Ada atau tidaknya kegiatan konsultasi publik	Ada atau tidaknya kegiatan konsultasi publik	Ada/tidak		FC Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah	Sumber data dari Bagian Hukum
30	Adanya media informasi penda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan Perkada	Ada/tidak		bukti kepemilikan media informasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda atau Peraturan Bupati	Sumber data dari Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Humas atau instansi terkait;
31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019	...%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019				
32	Belanja Publik terhadap DAU	Belanja Langsung (Realisasi) DAU Tahun 2019	...%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019	...%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Total realisasi Belanja APBD Tahun 2019				
34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019 Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019	...%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018	WTP, WDP, TMP, TW		FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota tahun 2018	Opini,; 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2019, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019			FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota tahun 2019	
36	Prosentase SILPA thdp total pendapatan	SILPA Tahun 2019%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019				
37	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi Belanja Tahun 2019%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2019				
38	Prosentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2019, sebanyak----- temuan.%		1. FC Rekomendasi LHP BPK, 2. FC Rekonsiliasi antara Inspektorat dengan BPK, 3. Perhitungan prosentase/rasio tuntas/tidak tuntas	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti
		Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019 sebanvak-----temuan.				
39	Realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD	Realisasi PAD Tahun 2019%		FC realisasi PAD dalam LRA 2019 setelah Audit BPK RI	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD)
		Potensi PAD Pada tahun 2019			FC data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2015-2019 untuk proyeksi PAD tahun 2019	
40	Peningkatan PAD	Total PAD pada tahun 2019%		Laporan realisasi anggaran 2018 setelah Audit BPK RI	Sumber data dari BPKAD
		Total PAD pada tahun 2018				

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan		FC data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan
42	Keberadaan E-procurement	ada/tidak ada Perda/Keputusan KDH tentang E-Procurement	Ada/tidak		FC Perda yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang jasa	Sumber data dari ULP. Data berupa proses e-procurement
43	Jumlah persetujuan investasi	Persetujuan ijin Investasi pada Tahun 2019	Izin		Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2019 dan total nilai investasi	Sumber data dari Kantor PTSP (PMDN >=200 Juta

DAFTAR PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG KABUPATEN DAN KOTA
LAMPIRAN II (PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM)

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (di luar program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (di luar program non teknis)	program	yang ada pada lampiran LPPD	FC program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan, nilai anggaran dan realisasinya	
2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah SOP	...buah		FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatangani SOP tsb	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis yaitu petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
		SOP #1	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #2	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #3	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #4	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #5	Jenis SOP	Teknis		
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		Photocopy Perda/perkada yg dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah per urusan berdasarkan Peraturan Menteri terkait	
		Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda		FC Peraturan Menteri per urusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.	
4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan		Daftar rincian yang menunjukkan pejabat struktural yang menangani urusan terkait	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan		FC Struktur organisasi dari SKPD khususnya bidang yang menangani urusan terkait	
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan		Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional teknis yang ada di Perangkat Daerah pada bidang yang menangani urusan terkait berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
		1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional			
		2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fungsional			
		3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fungsional			
		4. Jabatan Fungsional #4	Jab Fungsional			
6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS SKPD pada bidang terkait	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
		Jumlah PNS Provinsi	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS Provinsi dari BKD	
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah mengikuti Diklat PIM	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	
9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen			Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
	-RENTRA-SKPD	-RENTRA-SKPD	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani renstra tsb	
	-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani renja tsb	
	-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani rka tsb	
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program		Photocopy halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program dari skpd pada urusan terkait	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Jumlah Program dalam RKA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA	
12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
		Jumlah program dalam DPA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA	
13	Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD	Total anggaran SKPD	Rp		FC Laporan Keuangan SKPD	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Total anggaran belanja APBD	Rp			
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Realisasi Belanja Modal SKPD	Rp			Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Realisasi Belanja SKPD	Rp			
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp			Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp			
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp			Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Realisasi Belanja SKPD	Rp			
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen			Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, Calk)
	- Neraca	- Neraca	ada/tidak		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca tsb	
	- LRA	- LRA	ada/tidak		FC halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA	
	- Calk	- Calk	ada/tidak		FC halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan Calk	
18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak		FC sensus barang 5 tahun	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan atau digunakan oleh pihak lain	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp		Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai Perangkat Daerah	
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah			Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak		Foto	
	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	ada/tidak		Foto	
	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak		FC Leaflet	
	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak		Daftar Inventaris	
	5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak		Foto	
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak		FC surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait, dan FC Cover Hasil Survey	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah.

DAFTAR PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG KABUPATEN DAN KOTA
LAMPIRAN III (PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN)

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD%		FC Daftar Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Dinas/Bagian Dukcapil
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			FC Data Jumlah Anak usia 5-6 Tahun	
2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD%		FC data Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan,
		Jumlah Pendidik PAUD			FC data Jumlah Pendidik PAUD	
3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi%		FC data Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi	Dinas Pendidikan,
		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini			FC Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
4	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn keatas dapat baca tulis%		FC Daftar Jumlah Penduduk usia 15 thn keatas dapat baca tulis	Dinas Pendidikan dan Dinas/Bagian Dukcapil
		Jumlah penduduk usia 15th keatas			FC Daftar Jumlah penduduk usia 15th keatas	
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar%		FC data Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Sumber data dari Dinas Pendidikan dan Dinas Dukcapil
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			FC data Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama%		FC Daftar data Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Sumber data dari Dinas Pendidikan dan Dinas Dukcapil
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			FC data Jumlah anak usia 13-15 tahun	
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI%		FC data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya			FC data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs%		FC data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah siswa pada tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs			FC data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	
9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah (D IV) atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan Sekolah Dasar%		FC data Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar			FC Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar	
10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah guru yang berijazah kualifikasi S1/D-IV%		FC data Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA			FC data Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama	
11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi%		FC data Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP			FC data Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP	
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI%		FC data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya			FC data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI yang mengikuti ujian	
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs%		FC data jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya			FC data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs yang mengikuti ujian	
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs%		FC data Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya			FC data Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan%		FC data jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	
16	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan%		FC data jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
		Jumlah Penduduk di Kabupaten			FC Jumlah Penduduk di Kabupaten	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
17	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi minimal tingkat utama%		FC data Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
		Jumlah RS di Kabupaten			FC data Jumlah seluruh RS di Kabupaten	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten	Jumlah Tenaga kesehatan%		FC data Jumlah Penduduk Kabupaten	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
		Jumlah Penduduk Kabupaten			FC data jumlah Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan%		FC data Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah ibu hamil di Kabupaten			FC data jumlah ibu hamil di Kabupaten	
20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan%		FC data jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Dinas Kesehatan
		Jumlah ibu bersalin di Kabupaten			FC data jumlah ibu bersalin di Kabupaten	
21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%		FC data jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten			FC data jumlah bayi baru lahir di Kabupaten	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
22	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%		FC data jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah balita di Kabupaten			FC data jumlah balita di Kabupaten	
23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%		FC data Jumlah Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten			FC data jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten	
24	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar%		FC data Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten			FC data Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	
25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar%		FC data Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten			FC data Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	
26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%		FC data Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten			FC data Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	
27	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%		FC data Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita DM di Kabupaten			FC data Jumlah penderita DM di Kabupaten	
28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%		FC data Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten			FC data Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	
29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%		FC data Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita TBC di Kabupaten			FC data Jumlah penderita TBC di Kabupaten	
30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar%		FC data Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten			FC data Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	
31	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization(UCI)	Jumlah Kelurahan UCI%		FC data Jumlah Kelurahan UCI	Dinas Kesehatan
		Jumlah Seluruh Kelurahan			FC Daftar Jumlah Seluruh Kelurahan	
32	Persentase Balita Gizi Buruk dan Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Jumlah balita gizi buruk dan stunting mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan Di satu wilayah Kerja pd kurun waktu tertentu%		FC data Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu	Dinas Kesehatan
		Jumlah seluruh balita gizi buruk dan stunting yang ditemukan Disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama			FC data jumlah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	
33	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah Kerja selama 1 tahun%		Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatuwil. Kerja selama 1thn	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama			Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	
34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan%		FC data Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Dinas Kesehatan
		Jumlah Ibu Melahirkan			FC data Jumlah Ibu Melahirkan	
35	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)%		FC data panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	Dinas Pekerjaan Umum atau yang terkait.
		Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut			FC data panjang seluruh jalan Kabupaten	
36	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi%		FC data Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
		Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi			FC data Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi	
37	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)%		FC data Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)			FC data Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	
38	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m2)%		FC data Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten (m2)			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
39	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.%		FC Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten FC data Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
40	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Jumlah rumah di Kabupaten%		FC data Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD; FC data Jumlah total rumah di seluruh Kabupaten tersebut	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
41	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis%		FC data Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten			FC data Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten	
42	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya%		FC data Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi FC data Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
43	Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah rumah tangga bersanitasi Jumlah seluruh rumah tangga%		FC data mengenai jumlah rumah tangga bersanitasi FC data mengenai jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
44	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Jumlah seluruh rumah tangga%		FC data mengenai Jumlah rumah tangga pengguna air bersih FC data Jumlah seluruh rumah tangga	Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait
45	Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh Luas Wilayah%		FC data mengenai luas kawasan kumuh FC data mengenai luas wilayah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda atau unit yang terkait
46	Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah%		FC data mengenai jumlah luas RTH yang tersedia FC data pula luas wilayah daratan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
47	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting luas daerah irigasi kewenangan kabupaten%		FC data luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting FC data luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
48	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n%		FC data Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n FC data Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
49	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan%		FC data Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni FC data Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
50	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha%		FC data Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) FC data Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
51	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh Jumlah total unit rumah Kabupaten%		FC data jumlah unit rumah kumuh FC data total unit rumah di Kabupaten	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
52	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah unit rumah kabupaten%		FC data Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU FC data Jumlah total unit rumah di Kabupaten	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
53	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni Jumlah seluruh rumah diwilayah pemda ybs%		FC data data mengenai jumlah rumah layak huni FC data Jumlah seluruh rumah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
54	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk%		FC data jumlah pengaduan yang ditangani FC data jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
55	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan%		FC data Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi			FC Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	
56	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi <u>rawan bencana</u>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah		Fc data warga negara yang memperoleh layanan informasi <u>rawan bencana</u>	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
57	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah		FC data jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
58	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi <u>korban bencana</u>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah		FC Data Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi <u>korban bencana</u>	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
59	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah %		FC Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten			FC data Jumlah kejadian <u>kebakaran</u>	
60	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran			FC data Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
61	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi <u>kebutuhan dasarnya di luar panti</u> Jumlah Personil Satpol PP%		Fc data Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS FC data Jumlah Personil Satpol PP	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
62	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti%		FC data Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis			FC data Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	
63	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran%		FC data Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran			FC data Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	
64	Persentase rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng%		FC data Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai <u>standar</u> FC data Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
65	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga%		FC data Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan <u>keluarga</u>	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga			FC data Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga	
66	Persentase pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina%		FC data Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial FC data Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan <u>gepeng yang dibina</u>	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
67	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten%		FC data Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan <u>yang mengacu ke RTKD</u> FC data Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
68	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah tenaga kerja keseluruhan%		FC data Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi FC data Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
69	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Jumlah tenaga kerja%		FC data PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) FC data Jumlah tenaga kerja	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
70	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak%		FC Data Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Perusahaan			FC Data Jumlah Perusahaan	
71	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan%		FC data Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pencaker yang terdaftar			Fc data Jumlah pencaker yang terdaftar	
72	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial%		Fc data Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial			Fc data Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	
73	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi%		Fc data Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Instruktur			Fc data Jumlah Instruktur	
74	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan%		Fc data Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja			Fc data Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	
75	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD%		Fc data Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah seluruh belanja langsung APBD			Fc data Jumlah seluruh belanja langsung APBD	
76	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi%		Fc data Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)			Fc data Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	
77	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan%		Fc data Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penduduk perempuan			Fc data Jumlah penduduk perempuan	
78	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani%		Fc data Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan			Fc data Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	
79	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi Angkatan kerja perempuan%		Fc data jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait (sudah memiliki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kunjungi)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah angkatan kerja perempuan			Fc ata jumlah pekerja perempuan atau penduduk perempuan usia 15 s.d 64 tahun	
80	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan%		FC data Jumlah cadangan pangan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah kebutuhan pangan			FC data Jumlah kebutuhan pangan	
81	Tersedianya infrastruktur perdagangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak	Ada/tidak		FC data ketersediaan infrastruktur perdagangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
82	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi%		FC data Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi			FC data seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	
83	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum%		FC data jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		umlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			FC data Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	
84	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi%		FC data luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas izin lokasi yang diterbitkan			FC data luas izin lokasi yang diterbitkan	
85	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL)%		FC data Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penerima tanah obyek landreform			FC data Jumlah penerima tanah obyek landreform	
86	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat disuatu daerah%		FC data Jumlah Luas lahan bersertifikat di suatu daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas lahan yang seharusnya bersertifikat disuatu daerah			FC data Jumlah Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	
87	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah%		FC luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan			FC luas izin membuka tanah yang diterbitkan	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
88	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani%		FC data Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan			FC data jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	
89	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air (30%) 2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara (30%) 3. Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)			FC data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
90	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/ Terpadu di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani%		FC data total Volume sampah yang dapat ditangani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Total vol timbunan sampah kabupaten			FC data total volume timbunan sampah Kabupaten	
91	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten%		FC data Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan			FC data usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	
92	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran%		FC data Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun			FC data data Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	
93	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP%		FC data data Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penduduk 17 tahun ke atas			FC data Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	
94	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun%		FC data Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)			FC data Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	
95	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun%		FC data Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)			FC data Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	
96	PKK aktif	Jumlah PKK aktif%		FC data Jumlah PKK aktif	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah PKK			FC data Jumlah PKK	
97	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif%		FC data Jumlah Posyandu Aktif	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Total Posyandu			FC data total Posyandu	
98	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-49 tahun)%		FC data Jumlah TFR (Angka Kelahiran Total)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -49 tahun)				
99	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-19 tahun)%		FC data Jumlah Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -19 tahun)				
100	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern%		FC data Jumlah peserta KB Aktif Modern	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Pasangan Usia Subur			FC data jumlah pasangan usia subur (PUS)	
101	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani%		FC data Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Pasangan Usia Subur			FC jumlah pasangan usia subur (PUS)	
102	Rasio konektivitas Kabupaten	IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kabupaten tersebut IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kabupaten tsb x bobot lintas dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kabupaten tersebut)			FC data Rasio konektivitas kabupaten	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
103	Kinerja lalu lintas Kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten			V/C Ratio Jalan Kabupaten	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
104	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo %		FC data Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah OPD			FC data jumlah Perangkat Daerah	
105	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi %		FC data Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Layanan Publik			FC data Jumlah Layanan Publik	
106	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten %		FC data Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penduduk			FC data Jumlah penduduk	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
107	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government			FC data Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
108	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi %		FC data Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi			FC Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi	
109	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset %		FC data Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah seluruh koperasi			FC data Jumlah seluruh koperasi	
110	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha %		FC data Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah usaha mikro keseluruhan			FC data Jumlah usaha mikro keseluruhan	
111	Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha %		FC data Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah usaha kecil keseluruhan			FC data Jumlah usaha kecil keseluruhan	
112	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif %		FC data mengenai jumlah koperasi yang masih aktif	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah seluruh koperasi			FC data jumlah koperasi ada	
113	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten %		FC data mengenai (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten			FC data mengenai Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten	
114	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten %		FC data Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten			data mengenai Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)	
115	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten %		FC data Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten			FC data mengenai jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)	
116	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional			FC data Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
117	Persentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan %		FC data Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi			FC data mengenai jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi	
118	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah %		FC data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah OPD			FC data mengenai jumlah OPD	
119	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah %		FC data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah OPD			FC data mengenai jumlah OPD	
120	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi %		FC data Jumlah nilai per area keamanan informasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah area penilaian			FC data Jumlah area penilaian	
121	Tingkat keamanan informasi pemerintah Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan %		FC data Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah cagar budaya yang terdata			FC data Jumlah cagar budaya yang terdata	
122	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya			FC data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2019	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
123	Nilai Budaya Baca	Nilai budaya baca			Metode survei melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti frekuensi membaca per minggu, lama waktu membaca per hari, dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
124	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	$x = a' + b' / a + b \times 100\%$ x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan a' = naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks) b' = koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (eks) a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks) b = koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)			FC data jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
					FC data jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
125	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah%		FC data Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlahkoleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah			FC data Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	
126	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			FC data tingkat ketersediaan arsip	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
127	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan			FC data tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
128	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten			FC data Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
129	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional %		FC data Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		JumlahTempat Pelelangan Ikan			FC data Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	
130	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) %		FC data (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah wisatawan tahun n-1			FC data Jumlah wisatawan tahun n-1	
131	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) %		FC data (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah wisatawan tahun n-1			FC data Jumlah wisatawan tahun n-1	
132	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual %		FC data Jumlah kamar yang terjual	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah kamar yang tersedia			FC data Jumlah kamar yang tersedia	
133	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata %		FC data Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PDRB			FC jumlah total PDRB	
134	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD %		FC data Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PAD			FC jumlah total PAD	
135	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun %		FC data jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas Panen			FC data Luas Panen	
136	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian %		FC data Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PDRB			FC jumlah total PDRB	
137	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) %		FC Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular			FC Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	
138	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin %		FC Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi			FC Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	
139	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan %		FC data Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PDRB			FC jumlah total PDRB	
140	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan%		FC data Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kabupaten			FC data jumlah seluruh pelaku usaha	
141	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi			FC data realisasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)			FC data RDKK	
142	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan%		FC data jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten			FC datajumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
143	Pertambahan jumlah Industri kecil dan Menengah di kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)%		FC (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun n-1			FC Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	
144	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Jumlah Jenis Industri Prioritas Kabupaten%		FC data RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional				
145	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan%		FC Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan FC data Jumlah izin yang dikeluarkan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
146	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan%		FC data Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan FC Jumlah izin yang dikeluarkan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
147	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan%		FC data Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan FC data Jumlah izin yang dikeluarkan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
148	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya%		FC Data jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan pembinaannya	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten			FC data jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang diimplementasikan di Pemda	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD%		FC data jumlah program RKPD	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan			FC data jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan	
3	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan%		FC data mengenai Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah APBD			FC data Jumlah APBD	
4	Persentase PAD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan%		FC data mengenai Jumlah PAD FC data mengenai Jumlah PDRB non migas	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures%		FC data mengenai Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah belanja APBD			FC data mengenai Jumlah belanja APBD	
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP			FC data Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat Provinsi
7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP			FC data Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat Provinsi
8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n %		FC jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	Sumber data LPSE
		Jumlah kontrak keseluruhan tahun n			data jumlah kontrak keseluruhan tahun n	
9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif %		FC jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Sumber data LPSE
		Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif			FC data Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	
10	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan %		FC jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Sumber data LPSE
		Total belanja langsung			FC data Total belanja langsung	
11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) %		FC jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan);	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			FC data jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);	
12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi %		FC jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			data Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);	
13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi %		FC Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Total belanja APBD dikurangi satu			FC Total belanja APBD dikurangi satu	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
14	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)			1) data apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak); 2) data apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak); 3) data Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak); 4) data apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak).	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
15	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SILPA %		FC Nilai Realisasi SILPA	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		total Belanja Anggaran tahun sebelumnya			FC Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	
16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda %		FC Daftar Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda			FC Data Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	
17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda			FC data jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		total jumlah dokumen yang telah dirinci			FC data total jumlah dokumen yang telah dirinci	
Urusan Pemerintahan Umum/Trantibumlinmas						
1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	Kegiatan		FC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan politik daerah selama tahun 2019 ditandatangani oleh pejabat terkait	Sumber data dari Dinas Kesbangpol/Perangkat Daerah yang menangani
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan		FC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP selama tahun 2019 yang ditandatangani oleh pejabat terkait	Sumber data dari Dinas Kesbangpol/Perangkat Daerah yang menangani

DAFTAR PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG Kota
LAMPIRAN I PENGAMBIL KEBIJAKAN

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Keberadaan Perda IMB	Ada/tidak adanya Perda IMB	Ada/tidak	Yang ada dalam Lampiran LPPD	FC Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur perizinan tentang izin mendirikan bangunan	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
					FC legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya	
2	Rasio Rumah ber-IMB	Jumlah rumah ber-IMB	%		FC Jumlah rumah ber-IMB sd akhir tahun 2019	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
		Jumlah seluruh rumah			FC Jumlah rumah sd akhir tahun 2019	
3	Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum	Ada/tidak ada PERDA Ketertiban Umum	Ada/tidak		FC Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang ketertiban umum	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota
4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang terekam dalam e-KTP %		FC jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP	Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
		Jumlah penduduk wajib KTP			FC jumlah penduduk wajib KTP	
5	Pengurusan KIA	Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA %		FC Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA	
		Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA			FC jumlah anak yang seharusnya memiliki KIA	
6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2019			FC jumlah personil Satpol PP tahun 2019	Sumber data dari BKD dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Penduduk pada akhir tahun 2019	Jiwa		FC jumlah penduduk tahun 2019	
7	Keberadaan PERDA tentang Penanganan Bencana	Ada atau tidak ada PERDA Penanganan Bencana	Ada/tidak		Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor: -----Tahun----- tentang----(yang mengatur Penanganan Bencana)	Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum
8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota	Ada/tidak adanya Perda tentang Kebersihan Kota	Ada/tidak		Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor: -----Tahun----- tentang----(yang mengatur Kebersihan Kota)	Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan
9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019	Tanggal Penyampaian LPPD 2019 (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian		FC Bukti Penyerahan LPPD 2019 kepada Provinsi	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otonomi Daerah
10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2008	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2019 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian		FC Bukti Penyerahan Laporan Keuangan Kota TA 2019 kepada Kementerian Keuangan RI	Sumber data dari Bagian Keuangan
11	Pemerintah Daerah yang Memiliki Peraturan tentang Penerapan SPM	Ada atau tidaknya Peraturan tentang penerapan SPM	Ada/tidak		FC Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang SPM	Sumber data dari Bagian Hukum
12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak -----MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan-----tentang kerjasama----- . 2) MOU dengan-----tentang kerjasama----- -.MOU		FC data jumlah MOU/Nota Kesepahaman atau kerjasama antar daerah yang masih berlaku sampai dengan tahun 2019	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otonomi Daerah
13	Kesesuaian prioritas pembangunan nasional	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional %		FC data jumlah prioritas pembangunan daerah	Sumber data dari Bappeda/Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Prioritas pembangunan nasional			data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
14	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2019%		FC data jumlah urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah Sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pada APBD tahun 2019	Sumber data dari Bappeda/Perangkat Daerah yang bersangkutan (Sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2019)
		Jumlah urusan wajib di UU23/2014			FC data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2019	
15	Waktu penetapan perda APBD 2018	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2019	tepat/ tidak tepat		FC halaman muka dan lembar pengesahan APBD	Sumber data dari Bappeda/BPKAD
16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Ada/ tidak ada		FC halaman muka dan lembar pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Sumber data dari Bappeda/BPKAD
17	Belanja untuk pelayanan dasar	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. ---- 2) Urusan KesehatanRp. ----- 3) Urusan PU dan Penataan Ruang Rp. -- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp..... 5) UrusanTrantibum dan LinmasRp. ----- 6) Urusan SosialRp.....%		1. FC Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK. 2.Data realisasi bantuan tunai ke lembaga pendidikan dan kesehatan	Sumber data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit)
18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019. 1. Urusan Pendidikan	Rp		FC Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK,	Sumber data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit)
		2. Urusan Kesehatan	Rp			
19	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Ada/ Tidak ada		FC Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik	Sumber data dari Bagian Hukum
20	Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kota tahun 2019			FC data jumlah PNS s.d 31 Desember 2019	Sumber data dari BKD dan instansi terkait
		Jumlah penduduk Kota tahun 2019			FC data Jumlah penduduk Kota tahun 2019	Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Catatan sivil.
21	Rasio PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Tesehatan)	Jumlah PNS Kota tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)			Jumlah PNS Kota tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)	Sumber data dari BKD
		Jumlah PNS Kota Tahun 2019			FC data jumlah PNS Kota Tahun 2019	
22	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah,sbb: 1) Bagian (Setda) = ----unit 2) Dinas = ----unit 3) Badan =----unit 4) Kantor = ----unit 5) RumahSakit =----unit 6) LembagaTeknis lainnya = ----unit 7) Kecamatan/Distrik = ----unit -Jumlah Perangkat Daerah = ----unitunit		Jumlah pembentukan Perangkat Daerah Berdasarkan PP18 Tahun 2016	Sumber data dari Bagian Ortala
23	PERDA yang ditetapkan	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019	... PERDA		FC data jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2019	Sumber data dari Bagian Hukum
24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	RAPERDA yang disetujui tahun 2019	...%		FC data jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	Sumber data dari Bagian Hukum
		RAPERDA yang di usulkan DPRD tahun 2019			FC data jumlah Raperda yang diusulkan ke DPRD tahun 2019 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	
25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019	...%		FC data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2019	Sumber data dari Sekretaris Dewan
		Keputusan DPRD dalam tahun 2019			FC Daftar data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD pada tahun 2019	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
26	Keputusan Kota yang ditindaklanjuti	Keputusan Kota yang ditindaklanjuti tahun 2019	...%		FC data jumlah Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti pada tahun 2019	Sumber data dari Bagian Hukum
		Keputusan Walikota tahun 2019 yang diusulkan			FC data jumlah Keputusan Walikota yang dikeluarkan pada tahun 2019	
27	Peraturan Kota yang ditindaklanjuti	Keputusan Gubernur tahun 2018 yang ditindaklanjuti	...%		FC data jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti pada tahun 2019	Sumber data dari Bagian Hukum
		Peraturan Kota dalam tahun 2019			FC data jumlah Peraturan Walikota yang dikeluarkan pada tahun 2019	
28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah Perda yang dibatalkan	...%		FC data mengenai perda-perda yang dibatalkan	Sumber data dari Bagian Hukum
		Jumlah Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah			FC data perda-perda yang dikirimkan untuk dievaluasi	
29	Ada atau tidaknya kegiatan konsultasi publik	Ada atau tidaknya kegiatan konsultasi publik	Ada/tidak		FC Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah	Sumber data dari Bagian Hukum
30	Adanya media informasi pmda yang dapat diakses oleh publik (website Kota, pos, bag humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan Perkada	Ada/tidak		bukti kepemilikan media informasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda atau Peraturan Bupati	Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Humas atau instansi terkait;
31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019	...%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019				
32	Belanja Publik terhadap DAU	Belanja Langsung (Realisasi) DAU Tahun 2019	...%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019	...%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Total realisasi Belanja APBD Tahun 2019				
34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019	...%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019				
35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018	WTP, WDP, TMP, TW		FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kota tahun 2018	
		Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019			FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kota/Kota tahun 2019	Opini,; 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2019, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
36	Prosentase SILPA thdp total pendapatan	SILPA Tahun 2019%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019				
37	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi Belanja Tahun 2019%		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2019				
38	Prosentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2019, sebanyak----- temuan.%		1. FC Rekomendasi LHP BPK, 2. FC Rekonsiliasi antara Inspektorat dengan BPK, 3. Perhitungan prosentase/rasio tuntas/tidak tuntas	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti
		Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak-----temuan.				
39	Realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD	Realisasi PAD Tahun 2019%		FC realisasi PAD dalam LRA 2019 setelah Audit BPK RI	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD)
		Potensi PAD Pada tahun 2019			FC data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2015-2019 untuk proyeksi PAD tahun 2019	
40	Peningkatan PAD	Total PAD pada tahun 2019%		Laporan realisasi anggaran 2018 setelah Audit BPK RI	Sumber data dari BPKAD
		Total PAD pada tahun 2018				

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan		FC data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan
42	Keberadaan E-procurement	ada/tidak ada Perda/Keputusan KDH tentang E-Procurement	Ada/tidak		FC Perda yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang jasa	Sumber data dari ULP. Data berupa proses e-procurement
43	Jumlah persetujuan investasi	Persetujuan ijin Investasi pada Tahun 2019	Izin		Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2019 dan total nilai investasi	Sumber data dari Kantor PTSP (PMDN >=200 Juta

DAFTAR PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG Kota DAN KOTA
LAMPIRAN II (PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM)

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (di luar program non teknis)	program	yang ada pada lampiran LPPD	FC program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan, nilai anggaran dan realisasinya	
2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Jumlah SOP	...buah		FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tsb	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis yaitu petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
		SOP #1	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #2	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #3	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #4	Jenis SOP	Teknis		
		SOP #5	Jenis SOP	Teknis		
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		Photocopy Perda/perkada yg dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah per urusan berdasarkan Peraturan Menteri terkait	
		Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda		FC Peraturan Menteri per urusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.	
4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan		Daftar rincian yang menunjukkan pejabat struktural yang menangani urusan terkait	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan		FC Struktur organisasi dari SKPD khususnya bidang yang menangani urusan terkait	
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan		Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional teknis yang ada di Perangkat Daerah pada bidang yang menangani urusan terkait berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
		1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional			
		2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fungsional			
		3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fungsional			
		4. Jabatan Fungsional #4	Jab Fungsional			
6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS SKPD pada bidang terkait	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
		Jumlah PNS Provinsi	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS Provinsi dari BKD	
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah mengikuti Diklat PIM	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	
9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen			Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
	-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya renstra tsb	
	-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya renja tsb	
	-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	ada/tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb	
10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program		Photocopy halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program dari skpd pada urusan terkait	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Jumlah Program dalam RKA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA	
12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
		Jumlah program dalam DPA SKPD	program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA	
13	Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD	Total anggaran SKPD	Rp		FC Laporan Keuangan SKPD	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggran)
		Total anggaran belanja APBD	Rp			
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Realisasi Belanja Modal SKPD	Rp			Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Realisasi Belanja SKPD	Rp			
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp			Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp			
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp			Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Realisasi Belanja SKPD	Rp			
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen			Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, Calk)
	- Neraca	- Neraca	ada/tidak		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca tsb	
	- LRA	- LRA	ada/tidak		FC halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA	
	- Calk	- Calk	ada/tidak		FC halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan Calk	
18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak		FC sensus barang 5 tahun	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan atau digunakan oleh pihak lain	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp		Daftar rincian yang menunjukan total aset yang dikuasai SKPD	
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah			Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak		Foto	
	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	ada/tidak		Foto	
	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak		FC Leaflet	
	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak		Daftar Inventaris	
	5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak		Foto	
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak		FC surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait, dan FC Cover Hasil Survey	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah.

DAFTAR PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG Kota DAN KOTA
LAMPIRAN III (PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN)

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD%		FC Daftar Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Dinas/Bagian Dukcapil
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kota yang bersangkutan			FC Data Jumlah Anak usia 5-6 Tahun	
2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD%		FC data Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan,
		Jumlah Pendidik PAUD			FC data Jumlah Pendidik PAUD	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi%		FC data Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi	Dinas Pendidikan,
		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini			FC Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	
4	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn keatas dapat baca tulis%		FC Daftar Jumlah Penduduk usia 15 thn keatas dapat baca tulis	Dinas Pendidikan dan Dinas/Bagian Dukcapil
		Jumlah penduduk usia 15th keatas			FC Daftar Jumlah penduduk usia 15th keatas	
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar%		FC data Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Sumber data dari Dinas Pendidikan dan Dinas Dukcapil
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kota yang bersangkutan			FC data Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kota yang bersangkutan	
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama%		FC Daftar data Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Sumber data dari Dinas Pendidikan dan Dinas Dukcapil
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kota yang bersangkutan			FC data Jumlah anak usia 13-15 tahun	
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI%		FC data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya			FC data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs%		FC data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs			FC data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	
9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah (D IV) atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan Sekolah Dasar%		FC data Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar			FC Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar	
10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah guru yang berijazah kualifikasi S1/D-IV%		FC data Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA			FC data Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama	
11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi%		FC data Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP			FC data Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP	
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI%		FC data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya			FC data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI yang mengikuti ujian	
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs%		FC data jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya			FC data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs yang mengikuti ujian	
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs%		FC data Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	
		Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya			FC data Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan%		FC data jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kota yang bersangkutan			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	
16	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan%		FC rincian data jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
		Jumlah Penduduk di Kota			FC rincian Jumlah Penduduk di Kota	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
17	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi minimal tingkat utama%		FC data Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
		Jumlah RS di Kota			FC data Jumlah seluruh RS di Kota	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Tenaga kesehatan%		FC data jumlah Jumlah Penduduk Kota	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
		Jumlah Penduduk Kota			FC data jumlah Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan
19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan%		FC data Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah ibu hamil di Kota			FC data jumlah ibu hamil di Kota	
20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan%		FC data jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Dinas Kesehatan
		Jumlah ibu bersalin di Kota			FC data jumlah ibu bersalin di Kota	
21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%		FC data jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
		Jumlah bayi baru lahir di Kota			FC data jumlah bayi baru lahir di Kota	
22	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%		FC data jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah balita di Kota			FC data jumlah balita di Kota	
23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%		FC data jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota			FC data jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota	
24	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar%		FC data jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota			FC data jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota	
25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar%		FC data jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota			FC data jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota	
26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%		FC data jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita hipertensi di Kota			FC data jumlah penderita hipertensi di Kota	
27	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%		FC data jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita DM di Kota			FC data jumlah penderita DM di Kota	
28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%		FC data jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita ODGJ di Kota			FC data jumlah penderita ODGJ di Kota	
29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar%		FC data jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita TBC di Kota			FC data jumlah penderita TBC di Kota	
30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar%		FC data jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota			FC data jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota	
31	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization(UCI)	Jumlah Kelurahan UCI%		FC data jumlah Kelurahan UCI	Dinas Kesehatan
		Jumlah Seluruh Kelurahan			FC Daftar Jumlah Seluruh Kelurahan	
32	Persentase Balita Gizi Buruk dan Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Jumlah balita gizi buruk dan stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Disatuwil Kerja pd kurun wkt tertentu%		FC data jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu	Dinas Kesehatan
		Jumlah seluruh balita gizi buruk dan stunting yang ditemukan Disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama			FC data jumlah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	
33	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatuwil. Kerja selama 1thn%		Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatuwil. Kerja selama 1thn	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam Kurun wkt yang sama			Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	
34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan%		FC data jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Dinas Kesehatan
		Jumlah Ibu Melahirkan			FC data jumlah Ibu Melahirkan	
35	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang)%		FC data panjang jalan Kota kondisi baik dan sedang (mantap)	Dinas Pekerjaan Umum atau yang terkait.
		Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut			FC data panjang seluruh jalan Kota	
36	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik Presentase Panjang Jalan Kota yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Panjang jalan Kota yang direhabilitasi/direkonstruksi%		FC data Panjang jalan Kota yang direhabilitasi/direkonstruksi	Dinas Pekerjaan Umum atau yang terkait.
		Panjang Jalan Kota yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi			FC data Panjang Jalan Kota yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi	
37	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota (ha)%		FC data Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota (ha)	Dinas Pekerjaan Umum atau yang terkait.
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota (ha)			FC data Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota (ha)	
38	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kota (m2)%		FC data Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kota (m)	Dinas Pekerjaan Umum atau yang terkait.

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi di WS Kewenangan Kota (m ²)			luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota (m)	
39	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kota.%		FC Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kota	Dinas Pekerjaan Umum atau yang terkait.
		Jumlah total rumah tangga di seluruh Kota tersebut			FC data Jumlah total rumah tangga di seluruh Kota tersebut	
40	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD%		FC data Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD;	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
		Jumlah rumah di Kota			FC data Jumlah total rumah di seluruh Kota tersebut	
41	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis%		FC data Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota			FC data Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota	
42	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi%		FC data Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
		Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			FC data Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	
43	Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah rumah tangga bersanitasi%		FC data mengenai jumlah rumah tangga bersanitasi	Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
		Jumlah seluruh rumah tangga			FC data mengenai jumlah seluruh rumah tangga di Kota	
44	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih%		FC data mengenai Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait
		Jumlah seluruh rumah tangga			FC data Jumlah seluruh rumah tangga	
45	Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh%		FC data mengenai luas kawasan kumuh	Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda atau unit yang terkait
		Luas Wilayah			FC data mengenai luas wilayah	
46	Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau%		FC data mengenai jumlah luas RTH yang tersedia	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas wilayah			FC data pula luas wilayah daratan	
47	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n%		FC data Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n			FC data Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	
48	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni%		FC data Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan			FC data Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah	
49	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)%		FC data Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha			FC data Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	
50	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh%		FC data jumlah unit rumah kumuh	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total unit rumah Kota			FC data total unit rumah di Kota	
51	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU%		FC data Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah unit rumah Kota			FC data Jumlah total unit rumah di Kota	
52	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni%		FC data data mengenai jumlah rumah layak huni	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs			FC data Jumlah seluruh rumah	
53	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani%		FC data jumlah pengaduan yang ditangani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk			FC data jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	
54	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan%		FC data Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi			FC Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	
55	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah		FC data warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
56	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah		FC data jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
57	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah		FC Data Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
58	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah %		FC Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah kejadian kebakaran di Kota			FC data Jumlah kejadian kebakaran	
59	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran			FC data Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
60	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS Jumlah Personil Satpol PP%		FC data Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS FC data Jumlah Personil Satpol PP	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
61	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti%		FC data Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis			FC data Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	
62	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran%		FC data Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran			FC data Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	
63	Persentase rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng%		FC data Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar FC data Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
64	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga%		FC data Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga			FC data Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga	
65	Persentase pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina%		FC data Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial FC data Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
66	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota%		FC data Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD FC data Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
67	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi%		FC data Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan			FC data Jumlah tenaga kerja keseluruhan	
68	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Jumlah tenaga kerja%		FC data PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) FC data Jumlah tenaga kerja	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
69	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak%		FC Data Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Perusahaan			FC Data Jumlah Perusahaan	
70	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan Jumlah pencari yang terdaftar%		FC data Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan FC data Jumlah pencari yang terdaftar	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
71	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial%		FC data Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial			FC data Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
72	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi%		Fc data Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Instruktur			Fc data Jumlah Instruktur	
73	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan%		Fc data Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja			Fc data Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	
74	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD%		Fc data Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah seluruh belanja langsung APBD			Fc data Jumlah seluruh belanja langsung APBD	
75	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kota yang didampingi%		Fc data Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kota yang didampingi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)			Fc data Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	
76	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan%		Fc data Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penduduk perempuan			Fc data Jumlah penduduk perempuan	
77	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani%		Fc data Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan			Fc data Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	
78	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi Angkatan kerja perempuan%		Fc data jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait (sudah memiliki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah angkatan kerja perempuan			Fc data jumlah pekerja perempuan atau penduduk perempuan usia 15 s.d 64 tahun	
79	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan%		FC data Jumlah cadangan pangan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah kebutuhan pangan			FC data Jumlah kebutuhan pangan	
80	Tersedianya infrastruktur perdagangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak	Ada/tidak		FC data ketersediaan infrastruktur perdagangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
81	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi%		FC data Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi			FC data seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	
82	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum%		FC data jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			FC data Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	
83	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi%		FC data luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas izin lokasi yang diterbitkan			FC data luas izin lokasi yang diterbitkan	
84	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL)%		FC data Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penerima tanah obyek landreform			FC data Jumlah penerima tanah obyek landreform	
85	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat disuatu daerah%		FC data Jumlah Luas lahan bersertifikat di suatu daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas lahan yang seharusnya bersertifikat disuatu daerah			FC data Jumlah Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	
86	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah%		FC luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan			FC luas izin membuka tanah yang diterbitkan	
87	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani%		FC data Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		jumlah pengaduan sengketa tanah garapan			FC data jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	
88	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air (30%) 2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara (30%) 3. Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)			FC data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
89	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/ Terpadu di wilayah Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani%		FC data Total Vol sampah yang dapat ditangani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Total vol timbunan sampah Kota			FC data Total vol timbunan sampah Kota	
90	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota%		FC data Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
		Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan			FC data usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	
91	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran%		FC data Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun			FC data data Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	
92	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP%		FC data data Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penduduk 17 tahun ke atas			FC data Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	
93	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun%		FC data Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)			FC data Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	
94	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun%		FC data Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)			FC data Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	
95	PKK aktif	Jumlah PKK aktif%		FC data Jumlah PKK aktif	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah PKK			FC data Jumlah PKK	
96	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif%		FC data Jumlah Posyandu Aktif	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Total Posyandu			FC data total Posyandu	
97	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-49 tahun)%		FC data Jumlah TFR (Angka Kelahiran Total)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -49 tahun)				
98	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-19 tahun)%		FC data Jumlah Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -19 tahun)				
99	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern%		FC data Jumlah peserta KB Aktif Modern	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Pasangan Usia Subur			FC data jumlah pasangan usia subur (PUS)	
100	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani%		FC data Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Pasangan Usia Subur			FC jumlah pasangan usia subur (PUS)	
101	Rasio konektivitas Kota	IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kota/Kota x bobot trayek) dibagi Jumlah kebutuhan trayek pada Kota/Kota tersebut) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd Kota/Kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kota/Kota tersebut)			FC data Rasio konektivitas Kota	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
102	Kinerja lalu lintas Kota	V/C Ratio di Jalan Kota			V/C Ratio Jalan Kota	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
103	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo %		FC data Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah OPD			FC data jumlah Perangkat Daerah	
104	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi %		FC data Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Layanan Publik			FC data Jumlah Layanan Publik	
105	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota %		FC data Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah penduduk			FC data Jumlah penduduk	
106	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government			FC data Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
107	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi %		FC data Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi			FC Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi	
108	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset %		FC data Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah seluruh koperasi			FC data Jumlah seluruh koperasi	
109	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha %		FC data Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah usaha mikro keseluruhan			FC data Jumlah usaha mikro keseluruhan	
110	Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha %		FC data Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah usaha kecil keseluruhan			FC data Jumlah usaha kecil keseluruhan	
111	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif %		FC data mengenai jumlah koperasi yang masih aktif	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
112	Persentase peningkatan investasi di Kota	Jumlah seluruh koperasi (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di Kota %		FC data jumlah koperasi ada FC data mengenai (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah investasi tahun n-1 di Kota			FC data mengenai Jumlah investasi tahun n-1 di Kota	
113	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota %		FC data Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota			data mengenai Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)	
114	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota %		FC data Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota			FC data mengenai jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)	
115	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional			data Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
116	Persentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan %		FC data Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi			FC data mengenai jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi	
117	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah %		FC data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		jumlah OPD			FC data mengenai jumlah OPD	
118	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah %		FC data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah OPD			FC data mengenai jumlah OPD	
119	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi %		FC data Jumlah nilai per area keamanan informasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah area penilaian			FC data Jumlah area penilaian	
120	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan %		FC data Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah cagar budaya yang terdata			FC data Jumlah cagar budaya yang terdata	
121	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya			data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2019	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
122	Nilai Budaya Baca	Nilai budaya baca			Metode survei melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti frekuensi membaca per minggu, lama waktu membaca per hari, dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
123	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	$x = a' + b' / a + b \times 100\%$ x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan a' = naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks) b' = koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (eks) a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks) b = koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)			FC data jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
					FC data jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	
124	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah%		FC data Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah			FC data Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	
125	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j) / 4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			FC data tingkat ketersediaan arsip	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
126	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin			FC data tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
127	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota			FC data Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
128	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional %		FC data Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Tempat Pelelangan Ikan			FC data Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	
129	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) %		FC data (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah wisatawan tahun n-1			FC data Jumlah wisatawan tahun n-1	
130	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) %		FC data (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah wisatawan tahun n-1			FC data Jumlah wisatawan tahun n-1	
131	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual %		FC data Jumlah kamar yang terjual	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah kamar yang tersedia			FC data Jumlah kamar yang tersedia	
132	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata %		FC data Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PDRB			FC jumlah total PDRB	
133	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD %		FC data Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PAD			FC jumlah total PAD	
134	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun %		FC data jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Luas Panen			FC data Luas Panen	
135	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian %		FC data Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PDRB			FC jumlah total PDRB	
136	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) %		FC Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular			FC Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	
137	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin %		FC Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi			FC Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	
138	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan %		FC data Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah total PDRB			FC jumlah total PDRB	
139	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan %		FC data Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota			FC data jumlah seluruh pelaku usaha	
140	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi			FC data realisasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)			FC data RDKK	
141	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan %		FC data jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kota			FC data jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	
142	Pertambahan jumlah Industri kecil dan Menengah di Kota	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) %		FC (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun n-1			FC Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	
143	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)	Jumlah Jenis Industri Prioritas Kota %		FC data RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional				
144	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan %		FC Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah izin yang dikeluarkan			FC data Jumlah izin yang dikeluarkan	
145	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan %		FC data Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah izin yang dikeluarkan			FC Jumlah izin yang dikeluarkan	
146	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan %		FC data Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah izin yang dikeluarkan			FC data Jumlah izin yang dikeluarkan	
147	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembiayaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembiayaannya %		FC Data jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan pembiayaannya	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kota	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kota			FC data jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang diimplementasikan di Pemda	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD%		FC data mengenai Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan			FC data mengenai Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	
3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan%		FC data mengenai Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah APBD			FC data Jumlah APBD	
4	Rasio PAD	Jumlah PAD%		Fc data mengenai Jumlah PAD	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah PDRB non migas			Fc data mengenai Jumlah PDRB non migas	
5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures%		Fc data mengenai Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Jumlah belanja APBD			data mengenai Jumlah belanja APBD	
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP			data Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat Provinsi
7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP			data Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat Provinsi
8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n %		Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	Sumber data LPSE
		Jumlah kontrak keseluruhan tahun n			data jumlah kontrak keseluruhan tahun n	
9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif %		Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Sumber data LPSE
		Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif			data Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	
10	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan %		Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Sumber data LPSE
		Total belanja langsung			data Total belanja langsung	
11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) %		FC jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan);	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			FC data jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);	
12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi %		FC jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			data Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi %		FC Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Total belanja APBD dikurangi satu			FC Total belanja APBD dikurangi satu	
14	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)			1) data apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak); 2) data apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak); 3) data Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak); 4) data apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak).	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
15	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SILPA %		Nilai Realisasi SILPA	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		total Belanja Anggaran tahun sebelumnya			Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	
16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda %		Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda			Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	
17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda			Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	Sumber data dari Perangkat Daerah yang menangani
		total jumlah dokumen yang telah dirinci			total jumlah dokumen yang telah dirinci	
Urusan Pemerintahan Umum/Trantibumlinmas						
1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	Kegiatan		FC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan politik daerah selama tahun 2019 ditandatangani oleh pejabat terkait	Sumber data dari Dinas Kesbangpol/Perangkat Daerah yang menangani
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan		FC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP selama tahun 2019 yang ditandatangani oleh pejabat terkait	Sumber data dari Dinas Kesbangpol/Perangkat Daerah yang menangani

LAMPIRAN 3.
PETUNJUK PENGISIAN CAPAIAN KINERJA
TEMPLATE INDIVIDU PROVINSI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110

PETUNJUK PENGISIAN CAPAIAN KINERJA PADA TEMPLATE INDIVIDU PROVINSI

EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) TAHUN 2020
[PROVINSI]

PETUNJUK PENGISIAN CAPAIAN KINERJA PADA TEMPLATE INDIVIDU PROVINSI

A. Sheet Kesesuaian Materi

1. Jalankan *Worksheet Excel* Template Individu Provinsi Tahun 2019;
2. Buka Sheet Kesesuaian Materi pada *Worksheet Excel* Template Individu Provinsi Tahun 2019;
3. Isikan nama provinsi pada cell diatas kolom Kesesuaian Materi;
4. Tuliskan nama-nama evaluator yang melaksanakan klarifikasi dan pejabat yang menandatangani kertas kerja evaluasi dibawah tabel masing-masing urusan berserta tempat dan tanggal pelaksanaan klarifikasi;
5. Isikan angka "1" pada seluruh cell yang berwarna putih pada kolom Kesesuaian Materi;
6. Khusus untuk kolom Urusan Pilihan hanya diisi cell pada urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah jika memang tidak dilaksanakan kosongkan saja cell.

B. Sheet Capaian Makro

1. Buka Sheet Capaian Makro pada *Worksheet Excel* Template Individu Provinsi Tahun 2019;
2. Tuliskan nama-nama evaluator yang melaksanakan klarifikasi dan pejabat yang menandatangani kertas kerja evaluasi dibawah tabel masing-masing urusan berserta tempat dan tanggal pelaksanaan klarifikasi;
3. Isikan nilai dalam seluruh cell elemen data capaian makro pada kolom LPPD;
4. Perhatikan tanda kromatik pada setiap angka atau bilangan yang di input dalam cell elemen data.

C. Sheet Pengambil Kebijakan

1. Buka Sheet Pengambil Kebijakan pada *Worksheet Excel* Template Individu Provinsi Tahun 2019;
2. Tuliskan nama-nama evaluator yang melaksanakan klarifikasi dan pejabat yang menandatangani kertas kerja evaluasi dibawah tabel masing-masing urusan berserta tempat dan tanggal pelaksanaan klarifikasi;
3. Isikan nilai dalam seluruh cell elemen data capaian pengambil kebijakan pada kolom LPPD dengan memperhatikan tanda kromatik dan penulisan sesuai perintah pengisian (rumus persamaan atau non rumus persamaan);
4. Untuk IKK No. 4 dan 5 isikan tanggal penyampaian LPPD dengan cara menuliskan bulan/tanggal/tahun dalam cell J13 dan J14 pada kolom LPPD;
5. IKK No. 6 isikan nama-nama kabupaten/kota yang memiliki Perda/Perkada tentang Penerapan SPM pada cell J17;

6	Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pemerintah Daerah yang Memiliki Produk Hukum Daerah tentang Penerapan SPM	Total Kabupaten/Kota yang sudah Memiliki Peraturan Daerah/Perkada tentang Penerapan SPM	Perda/Perkada	11	100,00
				Sebutkan Kab/Kota yg memiliki Peraturan Daerah/Perkada yg sudah ttg SPM (Ada/Tidak)	1. Kota Jambi = ada 2. Kota Sungai Penuh = ada 3. Kab. Tebo = ada 4. Kab. Bungo = ada 5. Kab. Tanjabtim = ada 6. Kab. Merangin = ada 7. Kab. Sarolangun = ada 8. Tanjabar = ada 9. Muaro Jambi = ada 10. Kab. Batanghari = ada 11. Kab. Kerinci = ada	
			Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD	... Kab/kota	11	

6. IKK No. 7 isikan nomor dan tanggal MoU dalam cell elemen data pada kolom LPPD. Jika capaian kinerja lebih dari 4 (empat) MoU tambahkan jumlah MoU dengan cara menuliskan sisa jumlah MoU yang masih berlaku pada cell I24;
7. IKK No. 9 merupakan IKK agregasi dimana cara pengisiannya; isikan total capaian agregasi dalam cell J30, dimana setiap kabupaten/kota yang wajib menyampaikan LPPD dan telah melaksanakan 26 urusan wajib mendapatkan nilai sebesar 100%, maka jika terdapat 10 kabupaten/kota yang melaksanakan seluruh urusan wajib, perhitungannya adalah 10 kabkota dikalikan 100% dengan jumlah 1000% lalu isikan pada cell J30. Untuk mengisi cell J31 isikan jumlah kabupaten/kota yang wajib menyerahkan LPPD pada Provinsi yang bersangkutan;
8. IKK No. 10 cara pengisiannya hampir sama dengan IKK No. 3 yakni tuliskan bulan/tanggal/tahun penetapan Perda APBD;
9. IKK No. 12, isikan jumlah realisasi belanja masing-masing urusan pelayanan dasar dalam cell (J35:J40). Jika salahsatu urusan tidak terisi maka capaian kinerja menjadi 'TDI'. Perhatikan tanda kromatik pada setiap angka atau bilangan yang di input dalam cell elemen data;
10. IKK No. 18, cara pengisiannya hampir sama dengan IKK No. 7 yakni isikan nomor dan tanggal Perda dalam cell elemen data pada kolom LPPD. Jika lebih dari 12 (dua belas) Perda, tambahkan jumlah Perda dengan cara menuliskan sisa jumlah Perda yang ditetapkan pada cell N59.

D. Sheet Pelaksana Kebijakan/Administrasi Umum

1. Buka sheet Pelaksana Kebijakan pada *Worksheet Excel Template Individu Provinsi Tahun 2019*;
2. Isikan nama perangkat daerah yang melaksanakan urusan sesuai dengan nama urusan pada masing-masing kolom;
3. Tuliskan nama-nama evaluator yang melaksanakan klarifikasi dan pejabat yang menandatangani kertas kerja evaluasi dibawah tabel masing-masing urusan berserta tempat dan tanggal pelaksanaan klarifikasi;
4. Isikan nilai dalam seluruh cell elemen data capaian pelaksana kebijakan pada kolom LPPD dengan memperhatikan tanda kromatik dan penulisan sesuai perintah pengisian (rumus persamaan atau non rumus persamaan);
5. IKK No. 1 cukup isikan jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis);
6. IKK No. 2 isikan jenis *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai urusan yang dilaksanakan. Jika lebih dari 5 (lima) SOP tambahkan jumlah SOP dengan cara menuliskan sisa jumlah SOP yang masih berlaku masing-masing urusan pada kolom Catatan Klarifikasi cell M8, M72, M136, M200, ..., dst;
7. Perhatikan cara pengisian IKK No. 4 dimana jumlah jabatan yang ada adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural **definitif** dalam suatu perangkat daerah (pembilang), dan jumlah jabatan yang harus ada adalah banyaknya jabatan struktural dalam suatu SOTK perangkat daerah (penyebut);
8. Jika urusan yang ada, dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah atau fungsi penunjang maka cara pengisiannya adalah dengan menggunakan kertas kerja tambahan (Sheet berwarna merah), dimana total capaian kinerja urusan yang telah didapat lalu dimasukkan kedalam form masing-masing urusan;
9. Khusus untuk IKK terkait jumlah PNS per urusan (IKK No. 6) dan Alokasi anggaran perangkat daerah (IKK No. 13), jumlah total PNS per urusan pada saat dijumlahkan

harus sama dengan total PNS daerah keseluruhan, begitu pula total alokasi anggaran per urusan pada saat dijumlahkan harus sama (*balanced*) dengan total belanja daerah keseluruhan;

10. Pada form urusan pilihan cukup diisi pada urusan yang hanya dilaksanakan selebihnya yang tidak dilaksanakan tidak perlu diisi/kosongkan saja.

E. Sheet Pelaksana Kebijakan/Urusan Pemerintahan

1. Buka sheet Urusan Pemerintahan pada *Worksheet Excel* Template Individu Provinsi Tahun 2019;
2. Tuliskan nama-nama evaluator yang melaksanakan klarifikasi dan pejabat yang menandatangani kertas kerja evaluasi dibawah tabel masing-masing urusan berserta tempat dan tanggal pelaksanaan klarifikasi;
3. Isikan nilai dalam seluruh cell elemen data capaian pelaksana kebijakan pada kolom LPPD dengan memperhatikan tanda kromatik dan penulisan sesuai perintah pengisian (rumus persamaan atau non rumus persamaan);
4. Sheet Urusan Pemerintahan merupakan isian untuk capaian kinerja urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum, dengan total 175 IKK, yang terdiri dari:
 - a. 122 IKK urusan wajib;
 - b. 34 IKK urusan pilihan;
 - c. 17 IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan; dan
 - d. 2 IKK urusan pemerintahan umum.
5. Teknis pengisian dalam sheet urusan pemerintahan dengan menginput elemen data capaian kinerja masing-masing IKK pada baik di kolom LPPD dan kolom hasil klarifikasi, sedangkan untuk isian pada kolom capaian kinerja IKK akan dihasilkan secara otomatis dari proses rumus dalam template berdasarkan elemen data yang diisi dengan satuan yang ditetapkan seperti persentase, rasio, ada atau tidak, dan jumlah.

Contoh :

a) Presentase

1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI%	80	88.89
		Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI		90	

b) Rasio

14	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	Per 1000	856	6.48
		Jumlah Penduduk Provinsi		132,000	

c) Penyataan

41	Ketersediaan Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD)	Ada atau tidaknya Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD)	ada/tidak	ada	ada
----	--	---	-----------	-----	-----

d) Jumlah

123	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	10	10.00
-----	--	--	-----	----	-------

6. Untuk IKK yang tidak ada/tidak diisi elemen datanya maka capaian kinerjanya akan dianggap TDI (tidak diperoleh informasi) dari proses rumus dalam template, sedangkan untuk capaian kinerja yang tidak dimungkinkan melebihi 100% dan atau

terdapat kesalahan dalam menginput elemen data yang diminta (tidak sesuai antara pembilang dan penyebut) maka akan tertulis "salah tolong check" dalam template.

Contoh :

TDI

2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS%		tdi
		Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS			

7. Kolom capaian kinerja IKK dapat berwarna "merah", yang berfungsi sebagai *reminder* (pengingat) evaluator bawah capaian kinerja IKK tersebut perlu dicek kembali, karena capaian kerjanya berpotensi melebihi capaian kinerja yang sewajarnya (*extreme*).

Contoh :

123	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	1000	1000.00
-----	--	--	-----	------	---------

8. Dari 122 IKK urusan wajib terdapat 38 IKK Agregasi, yaitu IKK Provinsi yang capaian kerjanya merupakan hasil dari capaian kinerja IKK Kabupaten/Kota. Terdapat 2 jenis IKK Agregasi, yaitu:

- a. Capaian kinerja agregasi yang dihasilkan dari rata-rata capaian kinerja IKK dari Kabupaten/Kota.

Untuk pengisian IKK agregasi ini pada kolom hasil klarifikasi, data diambil dari sheet agregasi template gabungan hasil evaluasi Kab/Kota yang selanjutnya di entry kedalam sheet agregasi template individu provinsi.

No Urut	No IKK Prov	No. IKK Kab/Kota	IKK
PENGAMBIL KEBIJAKAN			
1	1	1	Keberadaan PERDA IMB
2	2	3	Kab/kota memiliki perda tentang Ketertiban Umum
3	6	11	Pemerintah Daerah yang Memiliki Produk Hukum Daerah tentang Penerapan SPM
4	9	14	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah
CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN WAJIB			
1	19	19	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
2	20	20	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
3	21	21	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
4	22	22	Cakupan Balita Gizi Buruk dan Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan
5	23	23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
6	24	24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
7	25	25	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

8	26	26	Cakupan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
	27	27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
9	28	28	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
10	29	29	Cakupan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	30	30	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
12	31	31	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
13	32	32	Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
14	33	33	Cakupan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
15	44	43	Rumah Tangga Bersanitasi
16	45	44	Rumah Tangga Pengguna air bersih
17	50	53	Rumah Layak Huni
18	75	79	Partisipasi angkatan kerja perempuan
19	81	86	Luas lahan bersertifikat
20	106	112	Koperasi aktif

- b. Capaian kinerja Agregasi yang dihasilkan dari akumulasi/penjumlahan elemen data IKK dari Kabupaten/Kota.

Untuk pengisian IKK agregasi ini pada kolom hasil klarifikasi, data diambil dari sheet agregasi 2 template individu Kab/Kota yang selanjutnya di entry kedalam sheet agregasi 2 template individu provinsi.

No Urut	No IKK Prov	No. IKK Kab/Kota	IKK
CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN WAJIB			
1	34	34	Angka Kematian Ibu Per 10.000 Kelahiran Hidup
2	65	68	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
3	67	70	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
4	70	72	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial
5	74	77	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan)
6	87	92	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran

7	88	93	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik
8	89	94	Persentase pengentasan desa tertinggal
9	90	95	Persentase peningkatan status desa mandiri
10	92	99	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
11	102	109	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
12	104	111	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
13	108	114	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
14	109	115	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
15	115	121	Terlestarikannya Cagar Budaya
16	131	135	Produktivitas pertanian per hektar per tahun
17	132	137	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
18	145	141	Persentase kinerja realisasi pupuk

9. Jika ada yang tidak melaksanakan salah satu atau lebih urusan pilihan, maka diisi angka 0 pada sheet kesesuaian materi sesuai dengan urusan pilihan yang tidak dilaksanakan, sehingga capaian kinerja IKK urusan pilihan pada sheet urusan pemerintahan akan terisi BUP (tidak melaksanakan urusan pilihan) secara otomatis dari proses rumus dalam template.

Contoh :

Kelautan Perikanan	123	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton		BUP
	124	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%		BUP
	125	Ekspor hasil perikanan	Nilai export hasil perikanan (ton pertahun) Target daerah%		BUP
	126	Konsumsi ikan	Realisasi Konsumsi Ikan Target Konsumsi Ikan%		BUP

10. Untuk sheet Urusan pemerintahan (2), sheet ini tidak perlu dilakukan pengisian oleh evaluator, sheet ini merupakan hasil link dari sheet Urusan pemerintahan berupa rekapitulasi dari capaian kinerja IKK Urusan Pemerintahan.

Terakhir untuk sheet Rekap individu, merupakan rekapitulasi isian yang telah diinput dari sheet-sheet sebelumnya, tidak perlu mengisi secara manual untuk rekapitulasi tersebut karena dilakukan pengisian secara otomatis melalui rumus dalam template. Isian pada sheet ini merupakan sumber data yang akan dikompilasi pada template gabungan antar provinsi secara nasional.

LAMPIRAN 4.
PETUNJUK PENGISIAN CAPAIAN KINERJA
TEMPLATE INDIVIDU KABUPATEN/KOTA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110

**PETUNJUK PENGISIAN CAPAIAN KINERJA
PADA TEMPLATE INDIVIDU KABUPATEN/KOTA**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) TAHUN 2020
[KABUPATEN DAN KOTA]**

PETUNJUK PENGISIAN CAPAIAN KINERJA PADA TEMPLATE INDIVIDU KABUPATEN/KOTA

A. Sheet Kesesuaian Materi

1. Jalankan *Worksheet Excel* Template Individu Kabupaten/Kota Tahun 2019;
2. Buka Sheet Kesesuaian Materi pada *Worksheet Excel* Template Individu Kabupaten/Kota Tahun 2019;
3. Isikan nama kabupaten/kota serta nama provinsi pada cell diatas kolom Kesesuaian Materi;
4. Tuliskan nama-nama evaluator yang melaksanakan klarifikasi dan pejabat yang menandatangani kertas kerja evaluasi dibawah tabel masing-masing urusan berserta tempat dan tanggal pelaksanaan klarifikasi;
5. Isikan angka "1" pada seluruh cell yang berwarna putih pada kolom Kesesuaian Materi;
6. Khusus untuk kolom Urusan Pilihan hanya diisi cell pada urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah jika memang tidak dilaksanakan kosongkan saja.

B. Sheet Capaian Makro

1. Buka Sheet Capaian Makro pada *Worksheet Excel* Template Individu Kabupaten/Kota Tahun 2019;
2. Tuliskan nama-nama evaluator yang melaksanakan klarifikasi dan pejabat yang menandatangani kertas kerja evaluasi dibawah tabel masing-masing urusan berserta tempat dan tanggal pelaksanaan klarifikasi;
3. Isikan data dalam seluruh cell elemen data capaian makro pada kolom LPPD;
4. Perhatikan tanda kromatik pada setiap angka atau bilangan yang di input dalam cell elemen data;
5. Fungsi "TDI" pada cell capaian kinerja menunjukkan bahwa elemen data yang diminta tidak didapatkan informasi.

C. Sheet Pengambil Kebijakan

1. Buka Sheet Pengambil Kebijakan pada *Worksheet Excel* Template Individu Kabupaten/Kota Tahun 2019;
2. Tuliskan nama-nama evaluator yang melaksanakan klarifikasi dan pejabat yang menandatangani kertas kerja evaluasi dibawah tabel masing-masing urusan berserta tempat dan tanggal pelaksanaan klarifikasi;
3. Isikan data dalam seluruh cell elemen data capaian kinerja pengambil kebijakan pada kolom LPPD dengan memperhatikan tanda kromatik dan penulisan sesuai perintah pengisian (rumus persamaan atau non rumus persamaan);
4. Untuk IKK No. 9 dan 10 isikan tanggal penyampaian LPPD dan LKPD dengan cara menuliskan bulan/tanggal/tahun dalam cell J19 dan J20 pada kolom LPPD serta cell L19 dan L20 pada kolom klarifikasi;
5. IKK No. 12 isikan nomor dan tanggal MoU dalam cell elemen data pada kolom LPPD atau kolom klarifikasi. Jika capaian kinerja lebih dari 4 (empat) MoU tambahkan

jumlah MoU dengan cara menuliskan sisa jumlah MoU yang masih berlaku pada cell N24;

6. IKK No. 13 merupakan IKK yang penyebutnya sudah ***given*** sehingga cukup isikan saja data capaian kinerja pada cell J28 pada kolom LPPD atau cell L28 pada kolom klarifikasi;
7. IKK No. 15 cara pengisiannya hampir sama dengan IKK No. 3 yakni tuliskan bulan/tanggal/tahun penetapan Perda APBD;
8. IKK No. 17, isikan jumlah realisasi belanja masing-masing urusan pelayanan dasar dalam cell (J34:J40) pada kolom LPPD atau cell (L34:L40) pada kolom klarifikasi. Jika salahsatu urusan tidak terisi maka capaian kinerja menjadi 'TDI'. Perhatikan tanda kromatik pada setiap angka atau bilangan yang di input dalam cell elemen data;
9. IKK No. 18, cara pengisiannya hampir sama dengan IKK No. 5 yakni isikan nomor dan tanggal Perda dalam cell elemen data pada kolom LPPD atau kolom klarifikasi. Jika lebih dari 12 (dua belas) Perda, tambahkan jumlah Perda dengan cara menuliskan sisa jumlah Perda yang ditetapkan pada cell N58;
10. Khusus untuk IKK No. 31 sampai dengan 34 dan IKK No. 36 sampai dengan 40 isikan saja data pada kolom elemen data dimana data laporan keuangan *unaudited* diisi pada kolom LPPD sedangkan yang sudah *audited* diisi pada kolom klarifikasi.

D. Sheet Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum

1. Buka sheet Pelaksana Kebijakan pada *Worksheet Excel* Template Individu Kabupaten/Kota Tahun 2019;
2. Tuliskan nama-nama evaluator yang melaksanakan klarifikasi dan pejabat yang menandatangani kertas kerja evaluasi dibawah tabel masing-masing urusan berserta tempat dan tanggal pelaksanaan klarifikasi;
3. Isikan data dalam seluruh cell elemen data capaian kinerja pelaksana kebijakan pada kolom LPPD atau kolom klarifikasi dengan memperhatikan tanda kromatik dan penulisan sesuai perintah pengisian (rumus persamaan atau non rumus persamaan);
4. Untuk lampiran Pelaksana Kebijakan pengukuran kinerjanya dilihat dari kinerja urusan bukan perangkat daerahnya;
5. IKK No. 1 cukup isikan jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis);
6. IKK No. 2 isikan jenis Standard Operating Procedure (SOP) sesuai urusan yang dilaksanakan. Jika lebih dari 5 (lima) SOP tambahkan jumlah SOP dengan cara menuliskan sisa jumlah SOP yang masih berlaku masing-masing urusan pada kolom Catatan Klarifikasi cell M11, M73, M135, M197, ..., dst;
7. Perhatikan cara pengisian IKK No. 4 dimana jumlah jabatan yang ada adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural definitif dalam suatu perangkat daerah (pembilang), dan jumlah jabatan yang harus ada adalah banyaknya jabatan struktural dalam suatu SOTK perangkat daerah (penyebut);
8. IKK No. 5 isikan minimal 1 (satu) dan maksimal 4 (empat) nama jabatan fungsional tertentu (JFT) yang membidangi masing-masing urusan;
9. Jika urusan yang ada, dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah atau fungsi penunjang maka cara pengisiannya adalah dengan menggunakan kertas kerja

tambahan (Sheet berwarna merah), dimana total capaian kinerja urusan yang telah didapat lalu dimasukan kedalam form masing-masing urusan;

10. Khusus untuk IKK terkait jumlah PNS per urusan (IKK No. 6) dan Alokasi anggaran perangkat daerah (IKK No. 13), jumlah total PNS per urusan pada saat dijumlahkan harus sama dengan total PNS daerah keseluruhan, begitu pula total alokasi anggaran per urusan pada saat dijumlahkan harus sama (balanced) dengan total belanja daerah keseluruhan. Jika masih terdapat selisih antara jumlah pns dan alokasi belanja urusan maka proses penggabungan kinerja kabuapten dan kota tidak dapat dilakukan dikarenakan capaian kinerja hasil entry data setiap lampiran pada Sheet Rekap Skor tidak akan muncul;
11. Pada form urusan pilihan cukup diisi pada urusan yang hanya dilaksanakan selebihnya yang tidak dilaksanakan tidak perlu diisi/kosongkan saja dan seluruh capaian kinerja urusan pilihan yang tidak dilaksanakan akan tertulis BUP.

E. Sheet Pelaksana Kebijakan Urusan Pemerintahan

1. Buka sheet Urusan Pemerintahan pada *Worksheet Excel* Template Individu Kabupaten/Kota Tahun 2019;
2. Tuliskan nama-nama evaluator yang melaksanakan klarifikasi dan pejabat yang menandatangani kertas kerja evaluasi dibawah tabel masing-masing urusan berserta tempat dan tanggal pelaksanaan klarifikasi;
3. Isikan data dalam seluruh cell elemen data capaian pelaksana kebijakan pada kolom LPPD dengan memperhatikan tanda kromatik dan penulisan sesuai perintah pengisian (rumus persamaan atau non rumus persamaan);
4. Sheet Pelaksana Kebijakan Urusan Pemerintahan ini merupakan capaian kinerja seluruh indikator kinerja kunci (IKK) masing-masing urusan pemerintahan baik itu urusan pelayanan dasar, non pelayanan dasar ataupun urusan penunjang;
5. Perhatikan data pembilang dan penyebut capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kunci (IKK);
6. Terdapat beberapa indikator kinerja kunci (IKK) yang capaian kinerjanya bisa melebihi 100% seperti contoh pada Urusan Pendidikan IKK No. 5 dan 6. Namun terdapat pula indikator kinerja kunci (IKK) yang capaian kinerjanya tidak bisa melebihi 100% seperti contoh pada Urusan Kesehatan IKK No. 19 dan 20 sehingga ketika penyebutnya lebih kecil dari pembilang maka akan muncul tanda **"Salah Tolong Cek"**;
7. Disarankan untuk menggunakan MS Excel diatas 2013 dan tidak merubah struktur/komposisi template individu;
8. Gunakan password Template Individu Kabupaten/Kota "covid19";
9. Jika terdapat malfungsi rumus (#REF, DIV, #NAME, dsb), koordinator evaluator EPPD dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda di Line 021-3440783 atau melalui email otda.ekpkd@gmail.com.

LAMPIRAN 5. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI INDIVIDU



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110**

LOGO PEMPROV



**LAPORAN HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) ATAS LPPD
KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2020**

Nomor : LHE-...../PW../10/2020

LAP-.../.../INSP/2020

Tanggal :

PEMERINTAH PROVINSI

.....

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota. Produk hukum terbaru yang mengatur tentang penyusunan dan mekanisme LPPD sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebelum dikeluarkannya produk hukum lebih lanjut yang mengatur tentang teknis penyusunan LPPD sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka pelaksanaan evaluasi tahun 2018 atas LPPD tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, penyampaian LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan penyampaian LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah setiap tahun menjadi dasar untuk pelaksanaan EPPD serta penilaian, perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 13 Tahun 2019.

Selanjutnya untuk pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 akan berpedoman pada Surat Nomor ... Tanggal ... Penyampaian Manual Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan Evaluasi

1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan;
2. Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD tahun 2019;
3. Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota di tingkat provinsi dan nasional;
4. Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Sebagai masukan kepada Kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 PP Nomor 13 Tahun 2019.

C. Metode Evaluasi

Metode EPPD tahun 2020 terhadap LPPD tahun 2019 dilakukan dengan menilai 2 (dua) variabel yaitu :

1. indeks capaian kinerja 95%
2. indeks kesesuaian materi 5%

Penilaian variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.

- a. Penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri atas 13 aspek.
- b. Penilaian pada tataran Pelaksana Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja satuan manajerial kerja perangkat daerah (SKPD) terdiri atas 9 aspek yaitu 8 aspek administrasi umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM.

Prestasi capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

- Skor $3,21 \leq ST \leq 4,00$ mendapat prestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor $2,41 \leq T \leq 3,20$ mendapat prestasi Tinggi (T)
- Skor $1,61 \leq S \leq 2,40$ mendapat prestasi Sedang (S)
- Skor $0,81 \leq R \leq 1,60$ mendapat prestasi Rendah (R)
- Skor $0 \leq R \leq 0,80$ mendapat prestasi Sangat Rendah (SR)

BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. Pelaksanaan Evaluasi

1. Sesuai ketentuan Pasal 11 PP Nomor 13 Tahun 2019, penyampaian LPPD dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Meskipun demikian, pada tahun 2020, penyampaian LPPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diundur menjadi tanggal 30 April 2020 sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran *coronavirus disease* (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100/1664/OTDA tanggal 23 Maret 2020.
Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan Provinsi, penerimaan LPPD tahun 2019 Kabupaten/Kota pada tanggalbulan tahun 2019, tidak tepat/tepat waktu (*pilih salah satu*).
2. Berdasarkan hasil evaluasi atas data yang disajikan dalam LPPD tahun 2019 pada umumnya cukup baik namun terdapat beberapa data yang butuh disempurnakan, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan elemen data untuk masa yang akan datang.
3. Penyusunan LPPD tahun 2019 perlu dilakukan evaluasi mandiri untuk mendapatkan data yang *valid* dan akurat.

B. Hasil Evaluasi

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Penilaian Indeks Capaian Kinerja dilakukan terhadap "Tataran Pengambil Kebijakan", yakni kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang penilaiannya dilakukan pada "Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah", yakni kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi		
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi		
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang		
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah		
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Rendah		
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja		
Jumlah	43	100,00

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah terdiri dari aspek administrasi umum dan urusan pemerintahan dengan uraian sebagai berikut :

a. Aspek Administrasi Umum

Penilaian pada aspek administrasi umum mencakup urusan wajib, pilihan, fungsi penunjang umum pemerintahan dan urusan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

1) Skor dan Prestasi per Aspek

No	Uraian	Skor	Prestasi
1	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan		
2	Ketaatan Thd Peraturan / UU		
3	Penataan Kelembagaan		
4	Pengelolaan Kepegawaian		
5	Perencanaan Pembangunan		
6	Pengelolaan Keuangan		
7	Pengelolaan Barang Milik		
8	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat		

2) Skor dan Prestasi per IKK

Uraian	Jumlah	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi		
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi		
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang		
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah		
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Rendah		
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja		
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena bukan urusan pilihan		
Jumlah	714	100,00

3) Skor dan Prestasi per Urusan yang dilaksanakan oleh SKPD

- Skor tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah/Sangat Rendah terdapat pada urusan yaitu sebesar
- Skor terendah dengan prestasi Rendah/Sangat Rendah terdapat pada urusan yaitu sebesar

b. Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan terdiri dari 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan Umum dan Urusan Pemerintahan Umum. Penilaian terhadap urusan pemerintahan mendapatkan skor atau mendapat kategori prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah/Sangat Rendah dengan uraian sebagai berikut :

1) Urusan Wajib

Urusan wajib secara keseluruhan memperoleh skor dengan kategori prestasi Tinggi. Hasil evaluasi atas 24 urusan wajib sebagai

berikut :

UW yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	
UW yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	
UW yang memperoleh kategori prestasi Sedang	
UW yang memperoleh kategori prestasi Rendah	
UW yang memperoleh kategori prestasi Sangat Rendah	
UW yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	
Jumlah	24

- Skor dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada .. (.....) urusan dengan nilai skor tertinggi yaitu ada pada ... (.....) urusan yaitu
- Skor dengan prestasi Rendah/ Sangat Rendah terdapat pada (.....) urusan dengan nilai skor terendah ada pada(.....) urusan yaitu

Dari 24 urusan wajib terdapat 6 (enam) urusan wajib yang kinerjanya merupakan pelayanan dasar oleh pemerintah kabupaten/kota, hasil capaian kinerja 6 (enam) urusan wajib tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Urusan	Skor	Prestasi
1	Pendidikan		
2	Kesehatan		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum		

	dan Perlindungan Masyarakat		
6	Sosial		

2) Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan sebanyak ... (.....) urusan dan mendapat skor dengan kategori prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah/Sangat Rendah. Hasil evaluasi atas 8 (delapan) urusan pilihan sebagai berikut :

UP yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	
UP yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	
UP yang memperoleh kategori prestasi Sedang	
UP yang memperoleh kategori prestasi Rendah	
UP yang memperoleh kategori prestasi Sangat Rendah	
UP yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	
Jumlah	

- Skor Tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi yaitu terdapat pada (.....) urusan yaitu urusan
- Skor Terendah dengan prestasi Rendah/ Sangat Rendah yaitu terdapat pada (.....) urusan yaitu urusan

3. Indeks Kesesuaian Materi

Penilaian Indeks Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, Penerapan dan Pencapaian SPM, Akuntabilitas Kinerja dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2019. Hasil penilaian mendapatkan skor ...

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil EPPD di tingkat Provinsi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan peringkat sementara dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke (.....) dariKabupaten/Kota dengan skor atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi/ Tinggi/ Sedang/ Rendah/ Sangat Rendah (*pilih salah satu*) atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Gubernur Nomor Tanggal tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Rekomendasi :

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati/Walikota direkomendasikan sebagai berikut :

1. Tataran Pengambil Kebijakan.

Terhadap IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R)/ Sangat Rendah (SR) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang, sebagaimana terlampir.

2. Tataran Pelaksana Kebijakan.

a. Administrasi Umum

Terhadap IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi Rendah (R) / Sangat Rendah (SR) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang, sebagaimana terlampir.

b. Capaian Kinerja

Terhadap (.....) Urusan Wajib (.....) dan (.....) Urusan Pilihan (.....) dengan prestasi Rendah (R) / Sangat Rendah (SR) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Demikian hasil evaluasi LPPD pada pemerintah Kabupaten/Kota tahun 201 ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami haturkan terima kasih.

KETUA TIMDA PROVINSI

Sekretaris Daerah

Provinsi,

.....

NIP

ANGGOTA TIM DAERAH

Inspektur Provinsi,

ANGGOTA TIM DAERAH

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.....,

.....

NIP

.....

NIP

LAMPIRAN 6.
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL EVALUASI
TIM DAERAH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110

BERITA SERAH TERIMA HASIL EVALUASI TIMDA

Pada hari ini, ...tanggal ...bulan ...tahun ..., diserahterimakan dari Tim Daerah Provinsi ... kepada Tim Teknis Nasional EPPD (Tim Validasi dan Evaluasi) berupa Soft copy Template individu untuk ... Kabupaten/Kota se-Pemerintah Provinsi ..., yang telah dievaluasi oleh Tim Daerah untuk selanjutnya akan dilakukan Validasi oleh Tim Teknis Nasional, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Kabupaten ... | 11. Kota ... |
| 2. Kabupaten ... | 12. Kota ... |
| 3. Kabupaten | 13. Kota ... |
| 4. Kabupaten ... | 14. Kota ... |
| 5. Kabupaten ... | 15. Kota ... |
| 6. Kabupaten | 16. Kota ... |
| 7. Kabupaten | 17. Kota ... |
| 8. Kabupaten | 18. Kota ... |
| 9. Kabupaten ... | 19. Kota ... |
| 10. Kabupaten ... | 20. Kota ... |

(IbukotaProvinsi),
(TanggalPenandatanganan)

**Yang Menyerahkan,
Sekretaris Tim Daerah EPPD
Pemerintah Provinsi ...**

(.....)

LAMPIRAN 7.
BERITA SERAH TERIMA HASIL VALIDASI TIM
TEKNIS NASIONAL



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta, Telepon: (021) 3440783,
Faksimile: 3440783, www.kemendagri.go.id, Email: otda.ekpkd@gmail.com

BERITA SERAH TERIMA HASIL VALIDASI TIM TEKNIS

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., diserahterimakan dari Tim Teknis Nasional EPPD kepada Tim Daerah Provinsi ... berupa hasil validasi template individu untuk ... Kabupaten/Kota dan template gabungan Kabupaten/Kota setelah mendapat koreksi/klarifikasi/validasi oleh Tim Teknis Nasional EPPD berupa:

a. Soft copy Template Individu EPPD untuk ... Kabupaten/Kota se-Pemerintah Provinsi... yang telah divalidasi, yaitu:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Kabupaten ... | 11. Kota ... |
| 2. Kabupaten ... | 12. Kota ... |
| 3. Kabupaten ... | 13. Kota ... |
| 4. Kabupaten ... | 14. Kota ... |
| 5. Kabupaten ... | 15. Kota ... |
| 6. Kabupaten ... | 16. Kota ... |
| 7. Kabupaten ... | 17. Kota ... |
| 8. Kabupaten ... | 18. Kota ... |
| 9. Kabupaten ... | 19. Kota ... |
| 10. Kabupaten ... | 20. Kota ... |

b. Soft copy Template Gabungan Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi ... dan hard copy (terlampir) hasil pemeringkatan sementara Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi

(Jakarta),
(Tanggal Penandatanganan)

**Yang Menyerahkan,
a.n. Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD
Tim Validasi dan Evaluasi,**

1. (.....) (Kemendagri)

2. (.....) (BPKP)

LAMPIRAN 8.
BERITA ACARA DAN NOTISI HASIL EVALUASI
TIMDA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110

(KOP DAERAH)

BERITA ACARA

HASIL EVALUASI LPPD KABUPATEN/KOTA ...TAHUN 2020

Pada hari ini, ... tanggal ...bulan ...tahun..., bertempat di ... telah disepakati hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota* ... Tahun ... yang dihadiri oleh:

A. Nama Tim Evaluasi LPPD

1. Sdr. ... (Ketua/Anggota Tim/Instansi)
2. Sdri....(Anggota Tim/Instansi)
3. Sdri. ... (Anggota Tim/Instansi)
4. Sdr....(Anggota Tim/Instansi)
5. Sdr....(Anggota Tim/Instansi)
6. Dst.

B. Nama Penyusun LPPD Kabupaten/Kota

1. Sdri ... (Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota ... /Jabatan/Instansi)
2. Sdr ... (Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota ... /Jabatan/Instansi)
3. Sdri ... (Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota ... /Jabatan/Instansi)
4. Sdr ... (Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota ... /Jabatan/Instansi)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota ...Tahun ... sebagai berikut:

- a. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6976/OTDA tanggal 31 Desember 2019 kepada Gubernur Seluruh Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6977/OTDA tanggal 31 Desember 2019 kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

- e. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100/1664/OTDA tanggal 23 Maret 2020 Perihal Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- f. Surat No ... tanggal ...perihal Pedoman Pelaksanaan EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019;
- g. Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor Tanggal Perihal Pembentukan Tim Daerah Provinsi ...
- h. Surat Tugas Nomor : ... tanggal

2. Proses Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota ... Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Evaluasi terhadap LPPD ... dimulai tanggal ...s/d ...
- b. Metode pengukuran kinerja terdiri atas 2 (dua) variabel yaitu Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM):
 - **Penilaian Indeks Capaian Kinerja (ICK)** terdiri dari penilaian pada Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan. Untuk penilaian terhadap Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Bidang Administrasi Umum dan Tataran Pelaksana Kebijakan Urusan Pemerintahan.
 - Tataran Pengambil Kebijakan dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang terdiri dari 13 (tiga belas) Aspek;
 - Tataran Pelaksana Kebijakan Bidang Administrasi Umum dilakukan terhadap kinerja SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) Aspek.
 - **Indeks Kesesuaian Materi (IKM)** dilakukan penilaian terhadap materi yang disajikan di dalam LPPD apakah sudah sesuai dengan format LPPD pada Manual Penyusunan yang sudah diterbitkan.

Dalam Proses Evaluasi telah diberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ... untuk menyampaikan data susulan maupun koreksi terhadap LPPD Tahun 2019 sampai dengan Berita Acara ditandatangani antara Pemerintah Kabupaten/Kota...dengan Tim Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses evaluasi LPPD Kabupaten/Kota ... tahun ... telah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi keraguan atas hasil evaluasi serta tidak dimungkinkan untuk perbaikan susulan terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan dipergunakan untuk proses validasi oleh Tim Teknis Nasional di tingkat Provinsi.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota ... Tahun ...

(Ibu Kota Kabupaten/Kota), (Tanggal Penandatanganan)

Ketua Tim Teknis Daerah EPPD,

Ketua Tim Penyusun LPPD

(.....)

(.....)

Anggota-anggota Tim Teknis Daerah EPPD,

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

6. (.....)

7. (.....)

8. (.....)

Anggota-anggota Penyusun LPPD Kabupaten/Kota

9. (.....)

10.(.....)

11.(.....)

12.(.....)

(Ibu Kota), (Tanggal Penandatanganan)

Kepada Yth. :

Bupati/Walikota ...

up. Sekretaris Daerah

di-

.....

Perihal : Catatan Hasil Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota ... Tahun ...

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota ... berdasarkan Surat Nomor ... Tanggal... Perihal Pedoman Pelaksanaan EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019, Surat Keputusan Gubernur Nomor Perihal Pembentukan Tim Daerah Provinsi ... dan Surat Tugas Nomor ... Perihal Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan Catatan Hasil Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota ... Tahun 2019 oleh Tim Daerah Provinsi ... sebagai berikut:

1. Evaluasi meliputi kesesuaian materi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 3 tahun 2007 dan tingkat capaian kinerja baik pada Tataran Pengambil Kebijakan, Tataran Pelaksana Kebijakan, maupun Urusan Pemerintahan.
2. Hasil Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota ... Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Pengambil Kebijakan:
 - Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak ... IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi (TDI) sebanyak ... IKK (terlampir).
 - Terdapat...IKK pada LPPD yang telah disampaikan, yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi (terlampir).
 - 2) Pelaksana Kebijakan (SKPD yang melaksanakan urusan wajib dan pilihan):
 - Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak ...IKK dan tidak didukung rincian data yang

memadai/tidak diperoleh informasi (TDI) sebanyak ...IKK (terlampir).

- Terdapat...IKK pada LPPD yang telah disampaikan, yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi (terlampir).

3) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan:

- Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak ...IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi (TDI) sebanyak ...IKK (terlampir).
- Terdapat...IKK pada LPPD yang telah disampaikan, yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi (terlampir).

4) Beberapa catatan permasalahan terhadap pelaksanaan evaluasi Kabupaten/Kota ... , antara lain sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...
- c. ...

5) Terhadap catatan evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami mengharapkan Gubernur untuk mengambil langkah-langkah berupa:

- a. ...
- b. ...

Demikian disampaikan catatan hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota... Tahun 2019

Tim Teknis Daerah EPPD,

Ketua

NIP.

Anggota,

NIP.....

LAMPIRAN 9.
BERITA ACARA DAN NOTISI HASIL EVALUASI
TIM TEKNIS NASIONAL



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta, Telepon: (021) 3440783,
Faksimile: 3440783, www.kemendagri.go.id, Email: otda.ekpkd@gmail.com

BERITA ACARA

**HASIL VALIDASI TERHADAP EPPD TIM DAERAH DAN
EVALUASI LPPD PROVINSI ... TAHUN ...**

Pada hari ini ...tanggal... bulan... tahun ..., bertempat di ..., telah disepakati hasil validasi terhadap EPPD Tim Daerah dan evaluasi LPPD Provinsi ... Tahun ... yang dihadiri oleh:

A. Nama Tim Validasi dan Evaluasi LPPD

1. Sdr. ... (Ketua/Anggota Tim/Kemendagri)
2. Sdri. ... (Anggota Tim/BPKP)
3. Sdri. ... (Anggota Tim/Kemendagri)
4. Sdr. ... (Anggota Tim/BPKP)
5. Sdr. ... (Anggota Tim/Kemendagri)
6. Sdr. ... (Anggota Tim/Kemendagri)
7. Dst.

B. Nama Tim Daerah EPPD

1. Sdri ... (Ketua Tim Daerah/Instansi)
2. Sdr ... (Ketua Tim Daerah/Instansi)
3. Sdri ... (Ketua Tim Daerah/Instansi)
4. Sdr ... (Ketua Tim Daerah/Instansi)
5. Sdri ... (Ketua Tim Daerah/Instansi)
6. Dst.

C. Nama Penyusun LPPD Provinsi

1. Sdri ... (Tim Penyusun LPPD .../Jabatan/Instansi)
2. Sdr ... (Tim Penyusun LPPD .../Jabatan/Instansi)
3. Sdri ... (Tim Penyusun LPPD .../Jabatan/Instansi)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Validasi terhadap EPPD Timda dan Evaluasi LPPD Provinsi Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6976/OTDA tanggal 31 Desember 2019 kepada Gubernur Seluruh Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6977/OTDA tanggal 31 Desember 2019 kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
- e. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100/1664/OTDA tanggal 23 Maret 2020 Perihal Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- f. Surat Nomor ... tanggal ... perihal Pedoman Pelaksanaan EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019;

2. Proses Evaluasi terhadap LPPD Provinsi Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Evaluasi terhadap LPPD Provinsi ... dimulai tanggal ... s/d ... ;
- b. Metode pengukuran kinerja terdiri atas 2 (dua) variable yaitu Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM):
 - **Penilaian Indeks Capaian Kinerja (ICK)** terdiri dari penilaian pada Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan. Untuk penilaian terhadap Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Bidang Administrasi Umum dan Tataran Pelaksana Kebijakan Urusan Pemerintahan.
 - Tataran Pengambil Kebijakan dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang terdiri dari 13 (tiga belas) Aspek;

- Tataran Pelaksana Kebijakan Bidang Administrasi Umum dilakukan terhadap kinerja SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) Aspek.
- **Indeks Kesesuaian Materi (IKM)** dilakukan penilaian terhadap materi yang disajikan di dalam LPPD apakah sudah sesuai dengan format LPPD pada Manual Penyusunan yang sudah diterbitkan.

Dalam Proses Evaluasi telah diberikan kesempatan kepada Pemerintah ... untuk menyampaikan data susulan sampai dengan Berita Acara ditandatangani antara Pemerintah Provinsi ... dengan Tim Teknis Nasional.

3. Hasil Validasi terhadap EPPD Timda dan Evaluasi LPPD ... Tahun ... adalah sebagai berikut:

- a. Hasil validasi terhadap EPPD Tim Daerah ... (terlampir).
- b. Penyerahan Template Individu dan Gabungan Kabupaten/Kota Provinsi ... beserta Pemeringkatan Sementara Kab/Kota (terlampir).
- c. Hasil evaluasi terhadap LPPD Provinsi ...Tahun 2019, yang hasilnya berupa Lembar Kerja Evaluasi/Template Individu Provinsi (terlampir).
- d. Catatan Hasil EPPD terhadap LPPD Provinsi ...Tahun 2019 untuk perbaikan penyusunan LPPD pada tahun berikutnya (terlampir).

4. Telah diberikan kesempatan untuk perbaikan dan susulan data terhadap LPPD Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Kabupaten... | 11. Kota ... |
| 2. Kabupaten... | 12. Kota ... |
| 3. Kabupaten.... | 13. Kota ... |
| 4. Kabupaten... | 14. Kota ... |
| 5. Kabupaten... | 15. Kota ... |
| 6. Kabupaten.... | 16. Kota ... |
| 7. Kabupaten.... | 17. Kota ... |
| 8. Kabupaten.... | 18. Kota ... |
| 9. Kabupaten... | 19. Kota ... |
| 10. Kabupaten... | 20. Kota ... |

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, proses validasi dan evaluasi Kabupaten/Kota dan Provinsi ... sudah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi keraguan atas hasil validasi dan evaluasi LPPD serta tidak dimungkinkan untuk perbaikan susulan terhadap LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019. Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan dipergunakan untuk proses penggabungan dan pemeringkatan Provinsi, Kabupaten dan Kota secara Nasional.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019.

(Ibu Kota Provinsi),
(Tanggal Penandatanganan)

Jakarta,
(Tanggal Penandatanganan)

a.n. Gubernur
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Tim Daerah EPPD,

a.n. Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD
Ketua Tim Validasi dan Evaluasi,

(.....)

(.....)

Anggota-anggota Tim,

1. (.....) 2. (.....)

3. (.....) 4. (.....)

5. (.....) 6. (.....)

7. (.....) 8. (.....)

(Ibu Kota), (Tanggal Penandatanganan)

Kepada Yth. :

Gubernur ...

up. Sekretaris Daerah

di-

.....

Perihal : Catatan Hasil Validasi EPPD Timda dan Evaluasi terhadap LPPD ProvinsiTahun 2019.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan Validasi dan Evaluasi terhadap LPPD Provinsi ... berdasarkan Surat No: ... tanggal ... perihal Manual Tata Cara EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan Catatan Hasil Evaluasi terhadap LPPD Provinsi Tahun 2019 oleh Tim Validasi dan Evaluasi (Sekretariat Tim Teknis Nasional EPPD) sebagai berikut:

1. Evaluasi meliputi kesesuaian materi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 3 tahun 2007 dan tingkat capaian kinerja baik pada Tataran Pengambil Kebijakan, Tataran Pelaksana Kebijakan, maupun Urusan Pemerintahan.
2. Hasil Validasi EPPD Timda dan Evaluasi terhadap LPPD Provinsi ... Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terhadap validasi hasil EPPD Timda (template individu dan gabungan Kabupaten/Kota), sebagai berikut:
 - 1) Tim Validasi dan Evaluasi telah melaksanakan validasi terhadap hasil EPPD Kabupaten/Kota oleh Timda dari tanggal ... s.d ... sebanyak...Kabupaten dan ...Kota di wilayah Provinsi ...
 - 2) Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan validasi terhadap template individu telah disampaikan kepada Timda. Hasil perbaikan tersebut telah diserahkan kepada Tim Validasi dan Evaluasi dengan Berita Serah Terima hasil EPPD atas LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Provinsi ..., selanjutnya secara bersama-sama dilakukan penggabungan untuk mendapatkan peringkat Kabupaten/Kota dan untuk mendapatkan kinerja Provinsi yang diperoleh melalui agregasi.

b. Hasil evaluasi terhadap LPPD Provinsi ... Tahun 2019, sebagai berikut:

1) Pengambil Kebijakan:

- Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak ... IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi (TDI) sebanyak ... IKK (terlampir).
- Terdapat...IKK pada LPPD yang telah disampaikan, yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi (terlampir).

2) Pelaksana Kebijakan (SKPD yang melaksanakan urusan wajib dan pilihan):

- Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak ...IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi (TDI) sebanyak ...IKK (terlampir).
- Terdapat...IKK pada LPPD yang telah disampaikan, yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi (terlampir).

3) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan:

- Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak ...IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi (TDI) sebanyak ...IKK (terlampir).
- Terdapat...IKK pada LPPD yang telah disampaikan, yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi (terlampir).
- Terdapat ...IKK data capaian kinerja provinsi yang ditentukan oleh agregasi data capaian kinerja kabupaten dan kota pada LPPD yang telah disampaikan, yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi (terlampir).

3. Ringkasan permasalahan jumlah IKK TDI hasil evaluasi LPPD Provinsi Tahun 2019, sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

4. Ringkasan jumlah IKK yang TDI hasil validasi LPPD Kabupaten/Kota Provinsi ... Tahun 2019, sebagai berikut:

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah IKK TDI		
		Pengambil Kebijakan	Pelaksana Kebijakan Admin. Umum	Pelaksana Kebijakan Urusan Wajib & Urusan Pilihan
1.	Kabupaten			
2.	Kabupaten			
3.	Kabupaten			
4.	Kabupaten			
5.	Kabupaten			
6.	Kabupaten			
7.	Kabupaten			
8.	Kabupaten			
9.	Kabupaten			
10.	Kabupaten			
11.	Kota ...			
12.	Kota ...			
13.	Kota ...			
14.	Kota ...			
15.	Kota ...			
16.	Kota ...			
17.	Kota ...			
18.	Kota ...			
19.	Kota ...			
20.	Kota ...			

Beberapa catatan permasalahan terhadap pelaksanaan validasi Kabupaten/Kota Provinsi ... , antara lain sebagai berikut :

- a. ...
- b.
- c.

5. Terhadap catatan evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami mengharapkan Gubernur untuk mengambil langkah-langkah berupa:

- a. ...
- b. ...
- c. ...

Demikian disampaikan catatan hasil validasi EKPPD Timda dan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2019.

a.n. Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD
Tim Validasi dan Evaluasi,
Ketua

.....
NIP.

Anggota,

.....
NIP.....